

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PERHOTELAN DAN PARIWISATA
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah**

Oleh:

NANDA NURAULIAN

NPM: 1351010064

Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN

LAMPUNG

1438/2017

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PERHOTELAN DAN
PARIWISATA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah**

Oleh:

**NANDA NURAULIAN
NPM : 1351010064
Ekonomi Syariah**

Pembimbing I : Dr. Asriani, S.H., M.H

Pembimbing II : Vitria Susanti, M.Ec., Dev

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG
1439/2017**

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu sektor yang sangat menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan pada sektor tersebut merupakan sektor yang dapat menjadi ukuran akan kesejahteraan masyarakat dan berhasilnya kinerja pemerintahan secara umum. Kenaikan dan penurunan kemiskinan akan langsung berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, baik masyarakat, Negara bahkan secara global sekalipun. Hal ini lah yang menjadi permasalahan hampir disemua daerah yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Pada dasarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan tingkat kemiskinan, tetapi dalam hal ini penulis menitik beratkan pada sektor Upah minimum, Pengangguran dan PDRB.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh upah minimum, pengangguran dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung, serta melihat bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang hal tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh upah minimum, pengangguran dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung dan untuk mengetahui bagaimana ekonomi Islam memandang permasalahan tersebut.

Jenis dan sumber data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang berupa *time series* dengan periode pengamatan 2012-2017 (Periode Maret-September), variabel penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu Kemiskinan (Y) dan variabel independen Upah Minimum (X1), pengangguran (X2), dan PDRB (X3). Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka, data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan analisis regresi linear berganda diperoleh model persamaan: penyerapan tenaga kerja $Y = 16,734 - 2,407 X1 - 0,511 X2 + 0,582 + e$.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2012-2017 sedangkan variabel pengangguran dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2012-2017. Dalam Prespektif Ekonomi Islam, mengenal lima prinsip utama dalam mengentaskan kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi, penciptaan anggaran negara, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan kebijakan pemerataan distribusi pendapatan yang memihak masyarakat miskin.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**
TINGKAT KEMISKINAN MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi di Provinsi Lampung Tahun
2012-2016
Nama Mahasiswa : **NURUL AZMI**
NPM : **1351010107**
Jurusan : **Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 Desember 2017

Pembimbing I

Madnasir, S.E., M.Si.

NIP. 197504242002121001

Pembimbing II

Any Eliza, SE., M.Ak

NIP. 198380152006042004

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Madnasir, S.E., M.Si.

NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi di Provinsi Lampung Tahun 2012-2016, disusun oleh : **NURUL AZMI, NPM : 1351010107**, program studi : Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada tanggal Rabu, 17 November 2017.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : **Heni Noviarita, S.E., M.Si.**

Sekretaris : **Dimas Pratomo, S.E.I., M.E**

Penguji I : **Hanif, S.E., M.Si.**

Penguji II : **Madnasir, S.E., M.Si.**

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dr. Moh. Bahrudin, M.A
NIP. 195808241989031003

MOTTO

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. (Q.S Al-Luqman: 18).¹

¹ Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Syaamsil Qur'an, Bandung, 2007, h.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam ku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Sumanto dan Ibu Pamriani (Alm). Yang aku hormati dan aku banggakan. Selalu menguatkan ku sepenuh jiwa raga, merawatku, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan mendoakan ku agar selalu ada dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Adikku satu-satunya Nugroho Iqwancoro yang senantiasa selalu mendoakan ku, nenekku tercinta Rosmala yang senantiasa menasehatiku, serta keluarga besar kakek Anuar (Alm) dan kakek Mat Mihi (Alm). Berkat doa dan dukungan baik moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nanda Nuralian, dilahirkan di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 22 Desember 1995. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sumanto dan Ibu Pamriani (Alm). Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu MI Bumi Jaya pada Tahun 2000, SMP Negeri 01 Candipuro pada Tahun 2006 lulus pada Tahun 2009, SMK Negeri 01 Kalianda yang diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 memutuskan masuk keperguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung yang pada tahun 2017 bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penulis memilih program Studi Ekonomi Syari'ah. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada sang pelita kehidupan, seiring jalan menujuilah, Nabi Muhammad SAW. Serta kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya.

Skripsi dengan judul "*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Perhotelan dan Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Dengan kerendahan hati disadari bahwa peneliti dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan namun berkat bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Dr. Moh. Bahrudin, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

3. Madnasir, S.E., M.Si. dan Any Eliza S.E.,M.Ak. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Asriani, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Vitria Susanti, M.Ec., Dev, selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan membimbing serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini, ditengah kesibukan namun tetap meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di Jurusan Ekonomi Islam Raden Intan Lampung. Terimakasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, khususnya Jurusan Ekonomi Islam, terimakasih atas ketulusan dan kesediaannya membantu peneliti dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
7. Teman-temanku jurusan Ekonomi Islam angkatan 2013 khususnya kelas D beserta adik-adikku dijurusan Ekonomi Islam yang selalu membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan yang diberikan dengan penuh keikhlasan tersebut menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT.

7. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan ku angkatan 2013 untuk Nanda Nuraulian, Imas Anggraeny, Wiwin Riyanti, Maya Larasati, Atika Fauziyah, Tomi Ardi, Heni Deka Pratiwi, Melia Purnamasari, Nur Azizah, Munik Yuni Artika, Desi Ani Ayu Lukmana, Rosnaeni, Febriawan, Medriansyah, yang selalu membantuku dan senantiasa mendukung, memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak . Semoga Allah SWT membalas amal kebajikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bermanfaat. Amin.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materil, yang tak bisa disebutkan satu persatu. Semoga segala amal sholeh dan budi baiknya mendapat pahala dari Allah SWT, yang berlipat ganda. Amin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang peneliti kuasai. Oleh karena itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun.

Bandar Lampung, 22 Oktober 2017

Peneliti,

NANDA NURAULIAN
NPM: 1351010064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Ruang Lingkup Peneltian	

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Ketenagakerjaan.....	
1. Tenaga Kerja	
2. Penyerapan Tenaga Kerja	
3. Prinsip Ketenagakerjaan Dalam Islam	
B. Perhotelan	
1. Hotel	
2. Industri Perhotelan dan Penyerapan Tenaga Kerja	
3. Permintaan Industri Perhotelan Terhadap Tenaga Kerja	
4. Hotel Dalam Prespektif Ekonomi Islam.....	
C. Sektor Pariwisata	

1. Pariwisata	
2. Indusri Pariwisata dan Penyerapan Tenaga Kerja.....	
3. Permintaan Sektor Pariwisata Terhadap Tenaga Kerja.....	
4. Pariwisata Dalam Prespektif Ekonomi Islam	
D. Penelitian Terdahulu	
E. Kerangka Pemikiran.....	
F. Hipotesis	

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	
B. Sumber Data	
C. Teknik Pengumpulan Data	
D. Populasi dan Sampel.....	
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Analisa Data

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Jumlah Usaha Akomodasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015	5
Tabel 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandar Lampung 2008-2015	6
Tabel 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kotan di Provinsi Lampung, 2008-2015	8
Tabel 4 Definisi Operasional Variabel	78
Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2015	
Tabel 6 Jumlah Angkatan Kerja Kota Bandar Lampung Tahun 2007-2013 ...	
Tabel 7 Pertumbuhan Pendapatan Regional Perkapita PDRB dan ADHK Kota Bandar Lampung	
Tabel 8 Jumlah Usaha Akomodasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015	
Tabel 9 Objek & Daya Tarik Wisata di Kota Bandar Lampung	
Tabel 10 Lokasi Daya Tarik, Kawasan Strategis, dan Destinasi Pariwisata Kota Bandar Lampung	
Tabel 11 Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata Batu Putu Kota Bandar Lampung	
Tabel 12	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Grafik Kerangka Pemikiran	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : SK Pembimbing
2. Lampiran 2 : Kartu Konsultasi
3. Lampiran 3 : Surat Pra Riset
4. Lampiran 4 : Surat Riset
5. Lampiran 5 : Jumlah Hotel dan Tenaga Kerja
6. Lampiran 6 : Jumlah Biro Perjalanan Wisata dan Tenaga Kerja
7. Lampiran 7 : Ouput Regresi Berganda
8. Lampiran 8 : Tabel DW
9. Lampiran 9 : Ta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Judul skripsi Ini “Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017). Maka terlebih dahulu perlu dijelaskan istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul tersebut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya .¹
2. Faktor–Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.²
3. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan

¹Departemen Pendidikan Nasional ,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,(Jakarta: Gramedia , 2008), h. 58.

² Ibid. Hlm. 58

juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.³

4. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar bagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tinggi) ⁴
5. Ekonomi Islam adalah Ilmu ekonomi yang berdasarkan pada Al-Quran Dan Hadist. Para ulama, khususnya ahlusunnah wal jamaah bersepakat bahwa sumber hukum dalam islam adalah al-quran, sunnah, ijma' dan qiyas. ⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memengaruhi kemiskinan di Provinsi Lampung menurut perspektif ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun dipilih judul penelitian ini, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Berhasilnya pembangunan disuatu daerah mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik jika kesejahteraan masyarakat meningkat. Berhasilnya pembangunan suatu daerah dapat tercermin dalam laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Masih tinggi nya jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung

³Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). H. 320.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h. 1062.

⁵LukmanHakim ,*prinsip-prinsipekonomiislam*,(Surakarta : Erlangga ,2012), h.16.

menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Lampung nampak belum begitu berhasil dimana kemiskinan di Provinsi Lampung masih di atas 10 persen.

. Jika dilihat dari keadaan Provinsi Lampung yang merupakan gerbang lalu lintas kegiatan ekonomi antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang memiliki potensi sebagai salah satu simpul distribusi barang dan jasa yang ditunjang dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Lampung. Seharusnya potensi ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan juga pendapatan Provinsi Lampung sehingga dapat menekan angka kemiskinan yang tinggi. Tetapi realita yang terjadi Provinsi Lampung masih jauh tertinggal dibandingkan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera. Sehingga penulis tertarik meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

2. Secara Subjektif

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung yang di tinjau menurut Perspektif Ekonomi Islam dan juga dari aspek yang penulis bahas, permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk di bahas atau diteliti. Disamping itu pula data dari penelitian yang penulis lakukan ini dapat di peroleh melalui beberapa lembaga atau instansi yang terkait dan juga penelitian yang dilakukan oleh penulis ada

relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islma Jurusan Ekonomi Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang apa adanya. Masalah kemiskinan memang telah lama menjadi problem adaa ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi.⁶ Apabila dilihat dari pola hubungan sebab akibat orang miskin adalah mereka yang serba kurang mampu dan terbelit di dalam lingkaran ketidak berdayaan berada di bawah standar dalam aktivitasnya tetapi menjalani kegiatan seperti layaknya orang-orang yang berkehidupan lebih baik, dan kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal yang berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak ada akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan lehornatan yang layak sebagai warga negara.⁷

Secara konseptual kemiskinan dapat dipandang dari berbagai segi pertama-tama dari segi subsistem, dimana penghasilan dan jerih payah seseorang hanya pas-pasan bahkan hanya pas-pasan untuk dimakan saja, atau bahkan tidak cukup pula untuk itu. Segi ketidakmerataan menekankan pada

⁶Nano Prawoto, Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor1, April 2009: 58

⁷Katalog BPS, Kabupaten Pesawaran: 2011 h. 97.

posisi relative dari setiap golongan menurut pengashilannya terhadap posisi golongan yang lain. Sedangkan dari segi eksternal mencerminkan konsekuensi sosial dari kemiskinan yang berlarut-larut mengakibatkan dampak sosiaa yang tidak ada habis-habisnya.

Chambers mengatkan bahwa kemiskinan adalah suatu *interhgrated* concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*poweless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) ketersaingan (*isolation*), baik secara geografis maupun sosilogis.⁸

Ada tiga macam kemiskinan, yakni kemiskinan relatif yaitu menurut perbandingan kelas-kelas pendapatan, kemiskinan subjektif yaitu menurut prasaan per orang dan kemiskinan absolute. Kemiskinan absolute adalah apabila tingkat hidup seseorang tidak memungkinkannya untuk biasa memenuhi keperluan-keperluan yang mendasar, sehingga kesejahteraan baik fisik maupun mental terganggu karenanya. Dari semua keperluan dasar itu (antara lain pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendiidkan) yang paling pokok dan memerlukan upaya untuk memperolehnya adalah pangan.⁹

Dalam konsep ekonomi Islam sendiri kajian tentang kemiskinan mendapat perhatian yang cukup besar, menurut bahasa miskin berasal dari bahsa Arab yang sebenarnya yang menyatakan kefakiran yang sangat. Allah SWT menggunakan istilah di dalam firman-nya Qs. Al-Balad ayat 16.

⁸Criswardani Suryawati.2005, Memahami kemiskinan Secara Multidimensional, [Http://www.jmpk-online.net/volume_8/Vol_08_NO_03_2005.pd](http://www.jmpk-online.net/volume_8/Vol_08_NO_03_2005.pd).

⁹Moh. Soerjani dkk, *Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Ui Press, 1987), h. 135-136

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝

Artinya: “Atau kepada orang miskin yang sangat fakir”¹⁰

Kemiskinan sendiri merujuk pada Al-Qur'an disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (Keterbatasan untuk usaha), seperti dijelaskan pada ayat ke 237 surah Al-Baqarah berikut:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَ ۝ فِي
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْخَافَ ۝ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ ۝ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ۝ عَلِيمٌ ۲۷۳

Artinya: “ (Berinfakanlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihat) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. ”¹¹

Islam menyatakan perang dengan kemiskinan , dari berusaha keras membendunginya, serta mengawasi berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan, guna menyelamatkan aqidah, akhlak dan perbuatan memelihara kehdupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan serta ketentraman antara sesama anggota masyarakat.

Dalam pandangan tradisional masalah kemiskinan dan permasalahan ekonomi lain seperti masalah-masalah pengangguran dan ketimpangan produksi pendapatan dapat terpecah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), h. 895.

¹¹Lurensius Julian PP, *Rumus Praktis Menguasai Ekonomi*, (Yohyakarta: Pustaka Book Publisher, 2010), h. 114-115

tinggi dan pendapatan perkapita yang naik. Namun kenyataannya meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sering kali dibarengi bertambahnya pengangguran, kemiskinan maupun distribusi pendapatan yang semakin timpang. Hal ini tentu saja menjadi suatu masalah bagi Negara yang kebijakannya mengutamakan pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur keberhasilan perekonomian.

Menurut BPS, kemiskinan dikonsepsualisasi sebagai ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasar dan diukur dari sisi pengeluaran perkapita atau dengan kata lain kemiskinan dipandang dari sisi ketidak mampuan ekonomi. Berdasarkan data BPS tahun 2005-2014 pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2012	31,02	12,33
2013	29,89	12,36
2014	28,59	11,66
2015	28,55	11,47
2016	27,79	10,95
2017	27,45	10,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, diakses 1 Juli 2017

Pada tahun 2011 sampai dengan 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, upaya pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin telah tercapai pada tahun-tahun

tersebut jumlah penduduk miskin di Indonesia secara bertahap telah mengalami penurunan yaitu pada tahun 2011 31,02 juta jiwa atau (12,33 persen) dan pada bulan tahun 2014 menjadi 27,79 juta jiwa atau (10,95 persen).

Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan, sesuai dengan fungsi pemerintah menurut Dumaury adalah alokasi, distribusi, stabilisasi, dan dinamisatif. Peranan pemerintah tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika tujuan pembanguana yaitu pengentasan kemiskinan ingin terselesaikan.¹² Anggaran yang dikeluarkan untuk pengetasan kemiskinan menjadi stimulus dalam menurunkan angka kemiskinan dan beberapa persoalan pembangunan yang lain.

Peran pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari peranan pemerintah pusat. Oleh akrena itu, pembangunan suatu daerah dalam pelaksanaannya diupayakan untuk berjalan searah dengan apa yang menjadi pembangunan nasional. Pembangunan akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan melancarkan proses pembangunan. Pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik jika kesejahteraan masyarakat meningkat. Otonomi daerah yang efektif akan mendukung pembangunan daerah.

Berhasilnya pembangunan disuatu daerah juga tercermin dalam laju penurunan jumlah penduduk miskin. Provinsi Lampung nampaknya belum

¹² Dumaury, *Matematika Terapan Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Jakarta: BPFE 1996), h. 68.

begitu berhasil, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Presentase Penduduk Miskin di Sumatra
Periode Maret 2017 dan september 2017

Provinsi	Presentase Penduduk Miskin (%)		Rata-Rata (%)
	Maret 2016	September 2016	
Aceh	16,73	16,43	16,58
Sumatra Utara	10,35	10,27	10,31
Sumatra Barat	7,09	7,14	7,11
Riau	7,98	7,67	7,82
Jambi	8,41	8,37	8,39
Sumatra Selatan	13,54	13,39	13,46
Bengkulu	17,32	17,03	17,17
Lampung	13,69	13,43	13,56
Bangka belitung	5,22	5,04	5,13
Kepulauan Riau	5,98	5,84	5,91

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2017

Berdasarkan pada tabel 2.2, kondisi kemiskinan di Provinsi Lampung tidak jauh berbeda dengan masalah kemiskinan nasional yakni tingginya angka kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera, pada tahun 2015 Provinsi Lampung menempati urutan ke tiga dengan rata-rata 14,07 persen.

Di zaman yang serba global, peranan pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi khususnya merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih makmur. Tujuan kebijakan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran.

Salah satu ukuran kemakuran terpenting adalah pendapatan.¹³ Kemamuran tercipta karena ada kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan regional adalah tingkat besarnya pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut.

Menurut Mudrajat Kuncoro penyebab kemiskinan adalah berasal dari teori Nurkse yaitu teori lingkaran kemiskinan (*Vicious circke of poverty*) dimana terdapat tiga penyebab utama yaitu: (i) Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM), (ii) ketidak sempurnaan pasar, dan (iii) kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin oleh rendahnya PDRB per kapota). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses peciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya angka pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan, begitu seterusnya.¹⁴

¹³ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 13.

¹⁴ Prima Sukamaraga, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapota, dan Jumlah pengangguran Terhadap Jumlah penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi universitas Diponegoro Semarang dipublikasikan tahun 2011.

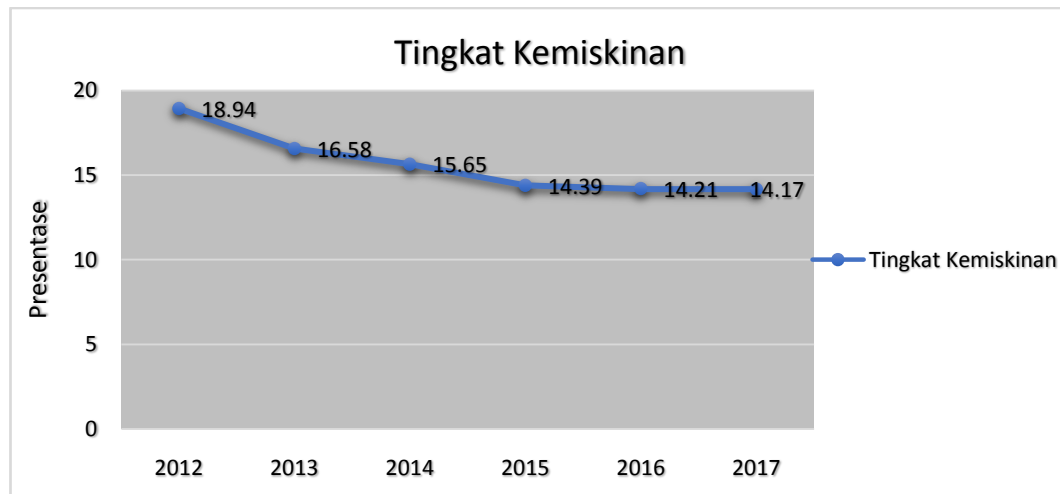
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bagong Suyanto pada tahun 1995, ada tiga faktor yang disinyalir menjadi penyebab kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan tetap mecolok, yakni¹⁵:

1. Sempitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, ditambah lagi kurang tersedia modal yang cukup untuk usaha.
2. Karena nilai tukar hasil produksi yang semaijn jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Karena tekanan perangkap kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat, dalam arti mereka relatif terisolir atau tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah terserang penyakit, tidak berdaya dan rentan.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Permasalahan di Provinsi Lampung adalah masih tingginya angka kemiskinan. Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Lampung dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.3. terlihat hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung memperlihatkan hasil positif. Pada tahun 2010-2014 presentase penduduk miskin di Provinsi Lampung terus mengalami penurunan, namun keberhasilan Provinsi Lampung belum sepenuhnya berhasil karena presentase kemiskinan di Provinsi Lampung masih di atas 10 persen.

¹⁵ Tamron Hasan, Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan dan Solusi Dalam Perspketif islam, Studi di Kelurahan Sukabumi kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Lampung, 2014, h. 27.

Gambar 2.3
Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung
Tahun 2012-2017 (Persen)



Sumber: BPS, Statistik Provinsi Lampung, Dalam Angka, 2017

Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu pemerintah provinsi Lampung kian fokus dalam menanggulangi masalah kemiskinan tersebut. Pemerintah Provinsi Lampung telah menentukan program penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2015 hingga 2019 dengan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) pada bulan Desember 2015. Selain itu menentukan target, sasaran, dan sinergitas program dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi juga telah membentuk Tim Penanggulangi Kemiskinan yang sebagian besar anggotanya adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah provinsi Lampung.

Sehingga setiap SKPD memiliki peran dalam penanggulangan kemiskinan di daerah itu.

Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan tetap adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika diiringi dengan pemerataan pendapatan.¹⁶

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal.¹⁷

¹⁶Wongdesmiwati, 2009, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisa Ekonometrika. https://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-_analisa-ekonometri_pdf. Diakses tanggal 3 Juli 2017

¹⁷Hernabto Siregar dan Dwi Wahyuniarti 2008, Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan maka pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan.

Kebijakan upah minimu juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh.¹⁸

Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men1999, Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksudkan dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak di eksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM). Jika kebutuhan

miskin.http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdfiles/PROS_2008_MAK3.pdf. Diakses tanggal 3 Juli 2017.

¹⁸Sony Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*, (Jember: Graha Ilmu, 2003). H. 57.

hidup minimum dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkatkan dan terbebas dari masalah kemiskinan.

Peraturan Menteri Nomor 17, tahun 2005 (Per-17/VII/2005), KHL merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak, baik fisik, non fisik, dan sosial selama satu bulan. Seorang pekerja dianggap hidup layak jika upahnya mampu memenuhi kebutuhan 3000 kalori per hari. Oleh karena itu, KHL, menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum. Ada 7 komponen KHL yang selalu dihitung, yaitu makanan dan minimum, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat pengangguran tenaga kerja penuh (*Full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik membahas masalah tersebut dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “Analisis

¹⁹Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).h. 47.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah minimum, pengangguran dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap upah minimum, pengangguran, dan PDRB serta kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Upah minimum, pengangguran dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017.
- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap upah minimum, pengangguran, PDRB dan kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis: pertama bagi akademisi memberikan sumbangsih hasil pemikiran mengenai permasalahan apakah, upah minimum,

pengangguran, dan PDRB secara simultan dan parsial mempengaruhi kemiskinan di provinsi lampung. Yang ke dua: Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh upah minimu, dan pengangguran, PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017 menurut perspektif ekonomi Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan: pertama Bagi pemerintah provinsi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi pemerintah provinsi Lampung mengenai pengaruh upah minimu, pengangguran, PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017 menurut persektif ekonomi islam. Yang kedua: Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang faktual berkaitan tentang pengaruh upah minimum, dan pengangguran, dan PDRB terhadap kemiskinan di provinsi Lampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kemiskinan

Kemiskinan menurut Shirazi dan Pramani adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual.¹

Sedangkan kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu kebutuhan gizi 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. Model ini pada intinya membandingkan tingkat konsumsi pendidikan dan kesehatan. Model ini pada intinya membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan suatu garis kemiskinan (GK), yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan.² Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum.³

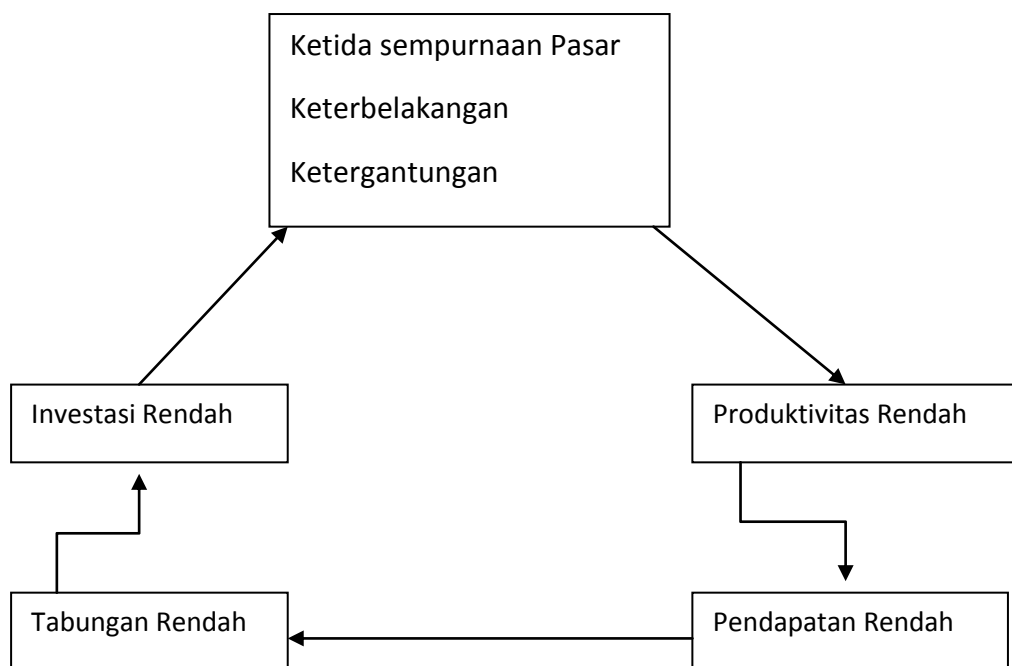
¹ Irfan Syauqi dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68.

² <https://www.bps.go.id>. Diunduh pada tanggal 20 Agustus 2017 jam 19:32 WIB.

³ Hendra Esmara, *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 287.

1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan bermula pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakhir pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Rukse, ekonomi pembangunan ternama di tahun 1953, yang mengatakan: *“A poor country is poor because it is poor”* (negara miskin itu karena dia miskin).⁴



Gambar 2.4 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan⁵

⁴ Okta Ryan Pranata Yudha, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011*, (Universitas Negeri Semarang: 2013), h. 15.

⁵ *Ibid*,

2. Indikator Kemiskinan

Foster dkk memperkenalkan tiga indikator untuk mengukur kemiskinan,⁶ yaitu:

- a. *The incidence of poverty* yaitu presentase dari populasi yang hidup didalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita dibawah garis kemiskinan
- b. *The depth of poverty* yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan Poverty Gap Indeks. Indeks ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dan garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut.
- c. *The severity of poverty* yang diukur dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK), indeks ini pada prinsipnya sama dengan IJK. Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan diantara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini juga disebut dengan distributionally sensitive indeks dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.⁷

⁶ Tulus Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Inklusif*, (Jakarta: LP3ES, 2016), h. 96-97

⁷ *Ibid*,

3. Macam-Macam Kemiskinan

a. Kemiskinan absolut

Yaitu dengan pendekatan ini diidentifikasi banyaknya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu, dimana diperhitungkan standar hidup minimal suatu negara, standar minimal antar negara dengan negara lain.⁸

b. Kemiskinan relatif

Yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif berkaitan dengan permasalahan distribusi pendapatan. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakat berubah.⁹

c. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah ketidakberdayaan sekelompok masyarakat dibawah suatu sistem pemerintah yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploritasi.¹⁰

4. Penyebab kemiskinan

Terdapat tiga macam pendekatan yang menjelaskan mengenai sebab-sebab kemiskinan, yaitu:

⁸ Nur Rianto al- Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 227.

⁹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 302.

¹⁰ Nur Rianto al-Arif, *Op Cit*, h. 228

a. *System approach*

Yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada adanya keterbatasan pada aspek-aspek geografi, ekologi, teknologi, dan demografi.¹¹ Kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut dianggap lebih banyak menekan warga masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau pedalaman.

b. *Decision-making model*

Pendekatan ini menekankan pada kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sebagai warga masyarakat dalam merespon sumber-sumber dari luar.¹² Dengan kata lain kemiskinan ini disebabkan karena kurangnya inovasi masyarakat untuk melakukan wirausaha, sehingga masyarakat hanya mengandalkan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh orang lain dan pemerintah tanpa ada upaya untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

c. *Structural approach*

Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan itu terjadi karena ada ketimpangan dalam kepemilikan atas faktor produksi, seperti tanah, teknologi, produktivitas, dan bentuk kapital lainnya.¹³ Hal ini tercermin dengan adanya sekelompok kecil dari masyarakat yang justru menguasai modal dan perekonomian masyarakat secara lebih dominan, seperti para pengusaha raksasa, dan sebagainya.

¹¹ *Ibid*, h. 234.

¹² Nur Rioanto, *Loc Cit*, h. 228.

¹³ *Ibid*,

B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian dan Teori pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.¹⁴ Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut.¹⁵

Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.¹⁶ Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk.¹⁷

Menurut Nafziger, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan produksi suatu negara atau kenaikan pendapatan per kapita suatu

¹⁴ Michael P Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 99.

¹⁵ Robinso Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2004), h. 44.

¹⁶ Adit Agus Prastyo, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*, Universitas Diponegoro Semarang 2010, h. 42.

¹⁷ *Ibid*,

negara, sedangkan menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.¹⁸ Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi,¹⁹ yaitu :

1. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resources). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi.
2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja

¹⁸ *Ibid*, h. 43.

¹⁹ Michael P Todaro dan Stephen C. Smith, *Op. Cit.*, h. 92.

(labor force) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

3. Kemajuan Teknologi. Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi,²⁰ yakni :

- a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
- b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (labor saving) atau hemat modal (capital saving), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama
- c. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

²⁰ *Ibid*, h. 96.

Menurut Nugraheni, pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu:²¹

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB), atau di tingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

b. Produk Domestik Bruto Per kapita/Pendapatan Per kapita Produk domestik bruto per kapita atau produk domestik regional bruto per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara daripada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik bruto per kapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PRDB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di

²¹ Adit Agus Prastyo, *Op. Cit.*, h. 44.

daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

Bank Dunia menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB), bukan PDB sebagai alat ukur perkembangan ekonomi suatu negara. yaitu dengan memperhitungkan pendapatan bersih dan faktor produksi milik orang asing. Walaupun PDB atau PNB per kapita merupakan alat pengukur yang lebih baik. namun tetap belum mencerminkan kesejahteraan penduduk secara tepat, karena PDB rata-rata tidak mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang sesungguhnya dirasakan oleh setiap orang di suatu negara. Dapat saja angka rata-rata tersebut tinggi, namun sesungguhnya ada penduduk atau sekelompok penduduk yang tidak menerima pendapatan sama sekali. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan unsur distribusi pendapatan di antara penduduk suatu negara. Dengan memperhatikan unsur distribusi pendapatan itu, maka PDB atau PNB per kapita yang tinggi disertai distribusi pendapatan yang lebih merata akan mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik daripada bila pendapatan per kapitanya tinggi namun ada distribusi pendapatan yang tidak merata. Meskipun demikian, demi sederhananya pengukuran, pendapatan per kapita tetap merupakan alat pengukur yang unggul dibanding dengan alat-alat pengukur yang lain.

2. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Siregar menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keberhasilan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan

tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar setiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*).²²

B. Upah Minimum

1. Pengertian Upah Minimum

Upah merupakan salah satu Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar atau perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk kelaarganya.²³

Dalam PP Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 41 dan 42 dijelaskan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas:

- a. Upah tanpa tunjangan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
- b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih

²² Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, *Op. Cit*, h. 27.

²³ Sonny Sumrsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 143.

dirundingkan secara biparti antara pekerja atau buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

Pemerintah menetapkan upah yang harus dibayar oleh perusahaan kepada para pekerja, upah ini diberikan nama upah minimum. Bagi sebagian pekerja, upah minimum ini tidak berpengaruh karena mereka sudah menikmati upah di atas upah minimum. Bagi sebagian lainnya, terutamanya yang tidak terdidik dan tidak berpengalaman hal ini berpengaruh, karena upah minimum mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminati oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran.²⁴

Para ekonomi percaya bahwa upah minimum memiliki dampak terbesar dalam pengangguran usia muda. Upah ekuilibrium para pekerja usia muda cenderung rendah karena dua alasan. Pertama, karena para pekerja usia muda termasuk anggota angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman, mereka cenderung memiliki produktivitas marjinal yang rendah. Kedua, para pemuda seringkali mengambil sebagian dari kompensasi mereka dalam bentuk on the job training dari pada bayaran langsung. Karena itu dalam angkatan kerja, upah sering kali berpengaruh pada para pemuda dari pada yang lainnya.²⁵

²⁴ N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi Edisi Keenam, Macroeconomics 6th Edition*, Terjemahan Fitria Liza dan Imam Nurmana, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.161.

²⁵ *Ibid*,

2. Penggolongan Upah

a. Upah Sistem Waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu lama kerja seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerja.

b. Upah Sistem Hasil (Output)

Upah sistem hasil ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan oleh pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilo gram. Besarnya upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil bukan didasarkan kepada lamanya waktu mengerjakan.

c. Upah Sistem Borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerja dan lama mengerjakan. Penetapan besarnya balas jasa cukup rumit, seperti lama mengerjakannya serta banyaknya alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.²⁶

3. Teori Upah Minimum

Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus

²⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 69.

dibayarkan.²⁷ Tujuan utama ditetapkan upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.

Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

Pada awalnya upah minimum dibentuk secara perpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk regoin atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan otomoni daerah, kemudia mulai tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh masing-masing provinsi. Upah

²⁷ N. Gregory Mankiw, *Op. Cit.*, h 43.

minimum ini dapat dibedakan menjadi upah minimum regional dan upah minimum sektoral.

a. Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum regional (UMR) dibedakan menjadi dua, yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II). Namun sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional Tingkat I I (UMR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten /Kota (UM kab/kota).

b. Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral

Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II). Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka terjadi perubahan istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMS kab/kota). Variabel-variabel yang mempengaruhi upah minimum regional (UMR) Tingkat I dan II sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, adalah sebagai berikut : kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 (4) tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa besaran upah minimum antara lain didasarkan pada tahap pencapaian KHL, pertumbuhan PDRB, produktivitas, dan mempertimbangkan keberadaan sektor marginal (usaha

yang paling tidak mampu). Pada pelaksanaannya, pertimbangan pada usaha tidak mampu ternyata belum dapat dioperasionalkan.

3. Hubungan Upah Minimum terhadap Kemiskinan

Menurut Kaufirman Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan.²⁸

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi 55 pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.²⁹

C. Pengangguran

Luasnya kesempatan kerja dan angkatan kerja biasanya digambarkan oleh banyaknya penduduk yang bekerja dan banyaknya penduduk yang menawarkan atau mencari pekerjaan. Berhubungan dengan itu perlu adanya kriteria kapan seseorang penduduk dimasukkan ke dalam kelompok bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik bekerja adalah kegiatan ekonomi yang di

²⁸ Adit Agus Prastyo, *Op. Cit.*, h. 54.

²⁹ *Ibid.*, h. 55.

lakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).³⁰

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk suatu di wilayah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Angkatan kerja yaitu bagian dari tenaga kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Mereka adalah kelompok penduduk usia kerja yang selama seminggu lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, pegawai cuti dan sejenisnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari/ menghadapi pekerjaan juga termasuk kategori angkatan kerja.
- b. Bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang tidak mempunyai atau melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah (yang kegiatannya hanya sekolah), mengurus rumah tangga (yang kegiatannya hanya mengurus rumah tangga/membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah. Atau lainnya (pensiunan, jompo, dan lain-lain).³¹

³⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Provinsi Lampung Dalam Angka 2016* (BPS: Lampung, 2016), ISSN: 0303-1942, No. Publikasi: 18560.1601, h. 47.

³¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, *Indikator Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2015*, ISSN: 2085-8981, No. Publikasi: 18520.1602, (BPS: Lampung, 2015), h. 6.

1. Klasifikasi Pengangguran

Dalam suatu perekonomian modern, pengangguran dapat dibedakan kepada tiga bentuk yaitu:³²

a. Pengangguran Normal

Pengangguran normal yaitu pengangguran yang disebabkan oleh keinginan pekerja-pekerja untuk mencari kerja yang lebih baik atau yang lebih sesuai dengan mereka. Pengangguran ini juga dinamakan dengan *search unemployment* atau *frictional unemployment*. Pengangguran seperti ini lebih banyak berlaku apabila pasaran tenaga kerja ketat, yaitu permintaan sama atau melebihi penawaran. Kesempatan kerja yang relatif banyak ini mendorong golongan pekerja untuk keluar dari pekerjaannya yang sekarang untuk mencari pekerjaan yang lebih dari segi pendapatan dan syarat-syarat kerja atau yang lebih sesuai dengan pendidikan, keahlian, dan kepribadian.

b. Pengangguran Struktural

Perkembangan suatu perekonomian akan menimbulkan perubahan-perubahan yang tidak selalu baik akibatnya kepada penggunaan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi akan memerlukan tenaga ahli, tetapi disamping itu ia akan menghemat penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian penggunaan teknologi modern dalam pembangunan, disamping akan meningkatkan pendapatan dan menyediakan kesempatan kerja baru, akan mengakibatkan pula pengangguran.

³² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 8.

Pengangguran ini berlaku di bidang-bidang yang pada mulanya dilakukan oleh pekerja yang sekarang digantikan oleh mesin-mesin.³³

c. Pengangguran Konjugtural

Pendapatan nasional sebenarnya pada umumnya berada di bawah pendapatan nasional potensial. Dalam keadaan seperti ini lebih banyak pengangguran akan berlaku. Apabila pendapatan nasional yang sebenarnya adalah sama dengan pendapatan nasional yang potensial, perekonomian ini masih menghadapi masalah pengangguran. Pengangguran mulai dianggap serius apabila tingkat kegiatan ekonomi berada di bawah tingkat kesempatan kerja penuh, dan ini dapat dilihat dari keadaan yang menunjukkan bahwa pendapatan nasional sebenarnya adalah berada di bawah pendapatan nasional potensial. Pengangguran yang disebabkan kemerosotan kegiatan ekonomi yang menyebabkan pengangguran konjugtural biasanya berlaku sebagai akibat kemerosotan dalam pengeluaran ke atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut. Kemerosotan itu adakalanya bersumber dari faktor-faktor yang bersumber dari dalam negeri, seperti masyarakat mengurangi tingkat investasinya. Dan adakalanya kemerosotan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang bersumber dari luar negeri seperti kemerosotan ekspor atau keinginan mengimpor yang semakin besar.³⁴

³³ *Ibid*, h. 9.

³⁴ *Ibid*, h. 10.

2. Pengangguran Berdasarkan Jenisnya

Berdasarkan hal tersebut, Edwards mengklasifikasikan lima jenis pengangguran yaitu:³⁵

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka yaitu pengangguran yang terjadi baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja namun tidak memperoleh pekerjaan).

b. Setengah Menganggur (*Underemployment*)

Setengah menganggur yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka mampu untuk kerjakan.³⁶

c. Tampaknya Bekerja Namun Tidak Bekerja Secara Penuh

Yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur, yang termasuk disini adalah:³⁷

1) Pengangguran tidak ketara (*Disguised Unemployment*)

Yaitu para petani yang bekerja di ladang selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh.

2) Pengangguran tersembunyi (*Hidden Unemployment*)

Yaitu orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.

³⁵ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-5* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 359.

³⁶ *Ibid*,

³⁷ *Ibid*, h. 358.

3) Pensiunan Lebih Awal

Fenomena ini merupakan kenyataan yang terus berkembang di kalangan pegawai pemerintah. Di beberapa negara, usia pensiun dipermuda sebagai alat untuk menciptakan peluang bagi kaum muda untuk dapat menduduki jabatan di atasnya.

d. Tenaga Kerja Lemah (*Impaired*)

Tenaga kerja yaitu mereka yang mungkin bekerja full time, namun lemah intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.³⁸

e. Tenaga Kerja Tidak Produktif

Yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif, namun karena sumberdaya komplementernya kurang memadai, maka mereka tidak dapat menghasilkan sesuatu dengan baik.³⁹

3. Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan

³⁸ *Ibid*,

³⁹ *Ibid*,

efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.⁴⁰

D. Kemiskinan dalam Perspektif Islam

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang sangat tidak dianjurkan oleh Islam. Islam melarang kepada umatnya untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan miskin sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa ayat ke 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ۖ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ ٩

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”* (QS. An-Nisa: 9).⁴¹

Kemiskinan merupakan sebuah konsep multidimensi yang sulit untuk didefinisikan secara tunggal. Banyak pakar dalam berbagai disiplin ilmu untuk mendefinisikannya.

Kemiskinan dalam perspektif Islam sesungguhnya memiliki sedikit pemahaman yang berbeda dengan kemiskinan secara konvensional. Islam mendefinisikan kemiskinan kedalam dua kategori yaitu fakir dan miskin.⁴²

Definisi fakir menurut mazhab Syafi'i dan Hambali yaitu orang yang tidak

⁴⁰ Adit Agus Prastyo, *Op. Cit.*, h. 64.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syami Alquran dan terjemahnya perkata*. PT. Sygma Examedia Arkanleema: Bandung. h. 78.

⁴² An Nisaa' Siti Humaira, *Kredit Berbasis Islam dalam Mengetaskan Kemiskinan* (Studi Kasus: Grameen Bank, Bangladesh). Jurnal the Moslem Planners 1, April-Mei: 2013.

memiliki penghasilan sekali karena ada sebab khusus yang syar'i (uzur syar'i), seperti usia tua, serta sibuk dalam dakwah sehingga tidak sempat untuk mencari nafkah. Seperti yang tercantum pada QS. Al-Baqarah: 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

Artinya: "(berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 273)⁴³

Sedangkan pengertian orang miskin menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan penghasilan. Hal ini di dasarkan pada QS. Al-Kahfi sebagai berikut:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧٩

Artinya: "Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, aku bermaksud merusaknya, karena dihadapan mereka ada seseorang raja yang merampas setiap perahu." (QS. Al-Kahfi: 79)⁴⁴

Menurut Al Ghazali kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukn merupakan kemiskinan. Al Ghazali

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 46.

⁴⁴ *Ibid*, h. 302.

membagi kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan rohani atau spritual. Hal tersebut juga didukung oleh pendapatan uang mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, akan tetapi juga kurangnya kemiskinan dalam roh. Rehman juga berpendapat umat Islam dapat meningkatkan kehidupan rohani mereka dengan meningkatkan kehidupan material mereka. Selanjutnya, Chapra berpendapat bahwa Islam menjadi agama keseimbangan, telah memberikan penekanan yang sama pada kedua spritual dan duniawi.

2. Penyebab kemiskinan dalam perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural yaitu:

- a. Kemiskinan timbul akibat kejahatan manusia terhadap alam yang tidak mampu mengelolanya dengan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Mulk: 21) sebagai berikut:

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرِثُكُمۡ إِنۡ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥٓ بَلۡ لَّجَوۡفِ عُنۡوٍ وَنُفُورٍ ٢١

Artinya: *“Atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya? Sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombngan dan menjauhkan diri”*. (QS. Al-Mulk: 21).⁴⁵

⁴⁵ Ibid, h. 563.

- b. Kemiskinan yng timbul karena ketidak pedulian dan kebakhilan kelompok kaya terhadap kelompok yang lain (miskin) sebagaimana diterangkan dalam QS. Al-Imron: 180) sebagai berikut:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَىٰهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۚ يَوْمَ الثَّغِيرَةِ
وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ١٨٠

Artinya: “sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan di kalungkan kelak di lehernya di ahri kiamat. Dan pepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Imron 180⁴⁶)

Islam menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh terjadi karena faktor malas. Justru Islam mengajarkan kepada kaum miskin untuk bersedekah meskipun dengan jumlah yang sangat sedikit. Seperti yang tercantum pada QS. Al-Imron: 134):

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ وَالْعَفَافِينَ
عَنِ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ ١٣٤

Artinya: “yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Imron: 134)⁴⁷

3. Bahaya Kemiskinan

⁴⁶ Ibid, h. 73.

⁴⁷ Ibid, h. 67.

Islam tidak membenarkan kaum sufi yang telah menerima konsep maseisme dari persia, india atau paham rahbaniyah kaum Masehi karena tidak satupun ayat Al-Qur'an dan hadits yang memuja kemiskinan. Hadits-hadits yang memuji zuhud bukan berarti setuju terhadap kemiskinan. Hadits-hadits yang memuji zuhud bukan berarti setuju terhadap kemiskinan. Menurut Islam kekayaan adalah suatu nikmat dan karunia dari Allah SWT yang harus disyukuri oleh umat manusia, sebaliknya, kemiskinan sebagai masalah bahkan musibah yang harus dihilangkan.

Dalam Al-Qur'an QS. Ad-Dhuha: 8) dijelaskan bahwa Allah SWT memuliakan Rasul-Nya dengan kecukupan materi, yakni sebagai berikut:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝۸

Artinya: *"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan."* (QS. Ad-Dhuha: 8)

Kelompok masyarakat miskin yang berbeda pada tingkat paling rendah sering dianggap sebagai penyakit masyarakat yang paling buruk. Pada lingkungan masyarakat miskin, semua ideologi yang ekstrim banyak diminati dan semua perbuatan keji sering dihalalkan demi memenuhi keinginannya. Hal ini pernah terjadi pada masa jahiliyah. Saat itu, orang-orang tega membunuh anak-anak mereka karena perasaan takut terhina oleh kemiskinan sebagaimana mereka melihat sebagai pengaruh kemiskinan yang membahayakan kehidupan seseorang. Memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan hal-hal dibawah ini, yaitu:

a. Kemiskinan membahayakan akidah

Kemiskinan dapat membahayakan akidah terutama pada masyarakat miskin yang tinggal di lingkungan orang kaya yang aniaya. Dalam keadaan ini kemiskinan dapat menebarkan benih-benih keraguan terhadap kebijaksanaan Allah mengenai pembagian rezeki. Akibat dari kemiskinan dan ketimpangan sosial, dapat menimbulkan penyimpangan akidah. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَبْرِ عَذَابِ

“telah menceritakan kepada kami waki’ telah menceritakan padaku Utsman Asy Syakham dari Muslim bin Abu Bakhras dari Ayahnya bahwa Nabi SAW biasa berdoa “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Mu dari kekufuran, kefakiran, dan azab kubur.”⁴⁸

b. Kemiskinan Membahayakan Akhlak dan Moral

Selain membahayakan akidah, kemiskinan juga dapat membahayakan akhlak dan moral, apalagi bagi kaum duafa yang tinggal di lingkungan orang kaya yang tamak akan mendorong orang miskin untuk melakukan kejahatan dan melanggar hukum.⁴⁹

⁴⁸ HR Ahmad. Hadits Abu Bakrah Nafi’ bin Al Hants bin Kaladah Ra. Kitab: Musnad Penduduk Bashrah, No 19487.

⁴⁹ *Ibid*,

Nabi SAW pernah menjelaskan hubungan kemiskinan dan kecukupan yang berkaitan dengan kebaikan dan kekejian seseorang. Beliau menuturkan:

Rasulullah SAW berdo'a dalam sholat: "apabila seseorang merugi dan berhutang, ia akan berbincang bohong dan berjanji kosong"⁵⁰

c. Kemiskinan mengancam kestabilan pemikiran

Kemiskinan tidak hanya berdampak pada sisi rohani dan akhlak saja, akan tetapi kemiskinan juga dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Apabila seseorang atau keluarga dalam keadaan miskin sedangkan mereka ingin hidup yang serba mewah maka pikiran-pikiran buruk pasti terlintas dalam pikiran mereka untuk memperoleh kemewahan tersebut.

- d. Kemiskinan dapat mengancam keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisan. Dari sisi pembentukan keluarga, kemiskinan menjadi rintangan besar bagi seorang pemuda untuk melangsungkan perkawinan, disamping dipenuhinya berbagai syarat seperti mahar, nafkah dan kecukupan ekonomi. Oleh karena itu Al-Qur'an menasehati bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk menjaga diri dan bersabar sampai berkecukupan secara ekonomi. Sedangkan terdapat dalam QS. An-Nuur: 33

وَلَيْسَ لِّلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ ...

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya..." (QS. An-Nur: 33)"⁵¹

⁵⁰ HR. Bukhori Muslim 2222. *Mecari pinjaman dan melunasi hutang*. No. 2397

Karena faktor kemiskinan ekonomi juga sering menyebabkan timbulnya pertengkaran rumah tangga perceraian. Menurut hukum Islam, hukum boleh menjatuhkan talak pada seorang istri yang suaminya tidak mampu memberikan nafkah. Jelaslah bahwa Islam mengakui adanya dampak ekonomi terhadap perilaku manusia.⁵²

e. Kemiskinan mengancam masyarakat dan kestabilannya

Selanjutnya, kemiskinan juga membahayakan keamanan dan kestabilan sosial. Seseorang masih bisa bertoleransi jika kemiskinan yang menimpanya disebabkan karena kurangnya penghasilan, akan tetapi lain halnya jika disebabkan karena kurangnya penghasilan, akan tetapi lain halnya jika kemiskinan disebabkan karena adanya kesenjangan atau ketidak merataan distribusi pendapatan, keserakahan golongan kaya, dan sikap berfoya-foya sekelompok kecil masyarakat diatas penderitaan orang banyak.⁵³ Kemiskinan semacam ini dapat memutuskan hubungan kasih sayang antar sesama masyarakat dan dapat menimbulkan perpecahan ditengah masyarakat.

Kemiskinan juga berbahaya terhadap kedaulatan, kebebasan, dan kemerdekaan suatu bangsa karena negara yang miskin pasti bergantung pada negara asing, dan suatu negara miskin tidak akan bisa

⁵¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 354.

⁵² Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), h.27.

⁵³ *Ibid*, h.29.

mensejahterakan masyarakat. Begitupun juga masyarakat tidak dapat mensejahterakan dirinya sendiri atau membela tanah airnya.

4. Pengentasan kemiskinan menurut perspektif Islam

Dalam perspektif syariah, kemiskinan terjadi akibat perbedaan pendapatan sesungguhnya merupakan sunnatullah *fil hayah*.⁵⁴ Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda-beda penghasilan tidak bisa dinafikkan oleh karena itu Islam tidak pernah berbicara untuk bagaimana menghilangkan kemiskinan, akan tetapi bagaimana caranya untuk mereduksi dan meminimalisir kemiskinan ini agar kehidupan yang lebih sejahtera dapat diraih. Caranya adalah sikap saling menolong, saling bersilaturahmi, saling mengisi dan saling bersinergi.⁵⁵

Ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang terkategori sebagai kelompok mampu, pihak yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila kelompok mampu ini tidak mempedulikan nasib kaum miskin, maka mereka disebut sebagai pendusta agama.⁵⁶ Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Mau'n: 1-3.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 70.

⁵⁵ *Ibid*,

⁵⁶ *Ibid*,

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحْضُرُ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustkan agama, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (QS. Al-Mau’n: 1-3).⁵⁷

Ali bin Abi Thalib menjelaskan terdapat lima pilar penting yang dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat menurut Islam anatar lain (1) ilmu para ulama (2) pemerintah yang adil, (3) kedermawaan kelompok orang-orang kaya (4) doany orang-orang fakir (5) kejujuran para pegawai. Dengan demikian Ali bin Abi Thalib menjadikan orang fakir miskin memiliki akhlak yang baik (dicirikan dengan suka berdoa) sebagai salah satu pilar penting dalm pembangunan suatu masyarakat.⁵⁸

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi prgram pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan, yaitu:

- a. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor growth). Islam mencapai pro-poor growth melalui dua cara yaitu pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil.
- b. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan masyarakat banyak (pro-poor budgeting). Dalam sejarah

⁵⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, h. 602.

⁵⁸ Retno Wuri, Kemiskinan: *Bagaimana Islam Memandang*. Junral The Moslem Planners Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan kota Institusi Teknilogi Bandung: Bandung. April-Mei 2013, h. 5.

Islam terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai pro-poor budgeting, yaitu kebijakan fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik atau efisiensi anggaran.

- c. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor infrastructure) sehingga memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.
- d. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (pro-poor public services). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang harus mendapat perhatian serius yaitu: birokrasi, pendidikan dan kesehatan.
- e. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak masyarakat miskin (*pro-poor income distribution*).⁵⁹ Terdapat empat instrumen utama dalam Islam terkait pendapatan dalam ekonomi Islam yaitu:

1) Zakat

Dalam Islam Allah memposisikan zakat sebagai poros utama bersama dengan shalat. Tanpa membayarkan zakat seseorang tidak dapat dianggap masuk dalam kelompok orang yang beriman dan telah dijanjikan oleh Allah kemenangan, surga firdaus, serta kabar

⁵⁹ *Ibid*, h. 6.

gembira bagi orang-orang yang membayar zakat.⁶⁰ Sebagaimana

firman Allah dalam surat Al-Mukminun yaitu:

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1), yaitu orang-orang yang khusyuk' dalam sembahyang (2), dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna (3), dan orang-orang yang menunaikan zakat (4).⁶¹

Begitu besar janji Allah bagi orang yang mebayar zakat oleh karena itu zakat menjadi satu kunci untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini karena kewajiban membayar zakat merupakan poros utama dalam sistem keuangan Islam (fiskal). Dan sesuai dengan prinsip distribusi kekayaan dalam Islam.⁶²

Zakat memiliki aturan yang sangat jelas dan adil, dengan mewajibkan membayarkan 2,5 persen dari hartanya setiap tahun zakat mampu mendorong masyarakat untuk memberdayakan hartanya. Dengan demikian akan terjadi peningkatan ekonomi. Selain itu zakat memiliki pengaruh yang cukup signifikan diberbagai sektor ekonomi, seperti daya produksi meingkat, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kesenjangan pendapatan dengan catatan zakat yang disalurkan tidak hanya untuk konsumtif. Zakat juga dibedakan menjadi dua macam yaitu zakat

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 93.

⁶¹ Kementrian Agama Republik indonesia, h. 313.

⁶² Ruslan Aabdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013), h. 98.

produktif dan zakat konsumtif. Dengan pendayagunaan zakat produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, zakat mampu mengubah kaum dhuafa (mustahik) menjadi (muzaki) dikemudian hari.

Zakat adalah infaq yang bersifat wajib dan merupakan ibadah. Tetapi dalam konteks ekonomi, zakat merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan (tauzi'u al-issarwah) diantara manusia. Menurut M.A Manna zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab menurut beliau salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah adanya penguasaan harta kekayaan oleh segelintir orang saja. Kewajiban membayar zakat secara tegas telah tertulis dalam QS. At-Taubah ayat 103 yakni:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ۖ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ ۖ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. At-Taubah: 103)⁶³

Ayat diatas menjelaskan bahawa makna bersih dari suci adalah untuk membersihkan dan mensucikan hati dan jiwa pada kecenderungan egoisme dan kecintaan terhadap harta duniawi, disamping penyucian terhadap harta itu sendiri.⁶⁴

⁶³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 203.

⁶⁴ Ruslan Abdul Ghofur, *Op. Cit*, h.99.

Menurut Ibn Hazm zakat merupakan suatu kewajiban dan juga sebagai peranan harta dalam mengentaskan kemiskinan peran pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberi sanksi kepada masyarakat yang enggan mengeluarkan zakatnya.⁶⁵ Kewajiban membayar zakat ini tidak akan hilang sampai ia mengeluarkannya dan pembayaran zakat tidak dibatasi oleh waktu.

2) Infak

infak atau sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah yang tertentu yang dilakukan dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT.⁶⁶ Infak dan sedekah dapat berupa material (uang, barang) dan juga dapat berupa non material (keahlian) infak yang berupa keahlian dapat diberikan menurut profesinya seperti kepada lembaga pendidikan SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi bagi mereka yang berprofesi sebagai guru.

Rekonstruksi infak dan sedekah profesi tersebut secara langsung dapat meningkatkan kemanfaatan lebih besar dari sekedar infak material berupa uang atau barang yang bisa dilakukan, sebab dapat mewujudkan kualitas manusia yang lebih baik melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hukum maupun uang lainnya secara gratis dan berkelanjutan.⁶⁷

⁶⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 194.

⁶⁶ *Ibid*,

⁶⁷ Ruslan Abdul Ghofur, *Op. Cit*, h. 122.

3) Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab yaitu dari akta waaf yang merupakan bentuk dari akta waqafa yang berarti berhenti.⁶⁸ Wakaf merupakan suatu jenis pemberian (barang atau kepemilikan) untuk di manfaatkan untuk kepentingan umum.⁶⁹ Cara menanggulangi kemiskinan tidak hanya dengan zakat namun juga bisa berupa wakaf yaitu dengan pengembangan kelembagaan (institusional building), akses, kesejahteraan (welfare), penyadaran (conszientization), dan partisipasi politik (political participation).

Pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan harta wakaf yang digunakan untuk pendidikan, ekonomi, dan kegiatan sosial. Secara ekonomi, harta wakaf dapat juga untuk meningkatkan kegiatan sosial keterampilan masyarakat miskin, seperti dengan mendirikan lembaga pendidikan pelatihan, rumah sakit, lembaga keuangan mikro, bank wakaf dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat agar dapat bersaing pada lapangan kerja dan terentaskan dari kemiskinan.⁷⁰

Wakaf terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- a. Wakaf tunai dari masyarakat

142. ⁶⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media group, 2015), h.

⁶⁹ Ruslan Abdul Ghofur, *Op Cit*, h. 112.

⁷⁰ *Ibid*,

Yaitu wakaf yang ditunjukkan untuk masyarakat kalangan ekonomi menengah keatas dengan nilai minimal Rp 1 juta. Wakaf dapat menentukan alokasi dana tunai untuk pendidikan atau kesehatan.

b. Wakaf tanah dan bangunan

Tanah dan bangunan yang diwakafkan harus merupakan kepemilikan penuh, sah, dan telah memperoleh persetujuan dari ahli waris. Jika wakaf dipandang produktif maka aset akan dikembangkan dengan modal pengelola (bersumber dari wakaf tunai) atau dikerja samakan dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan. Dan jika tanah wakaf dianggap tidak produktif maka boleh dijual untuk digabungkan dengan aset yang lain agar memberikan manfaat yang lebih besar.

c. Wakaf bisnis dan usaha

Yaitu aset yang menghasilkan profit yang semula dimiliki oleh individu menjadi milik umat yang kemudian memberikan masalah bagi masyarakat luas.

d. Wakaf saham dan surat berharga

Saham yang dapat diwakafkan yaitu saham perusahaan syariah terbuka, goodwill saham perusahaan tertutup, sukuk (obligasi) syariah, sukuk (obligasi) retail syariah, depositio syariah, reksadana syariah, wasiat wakaf dalam polis asuransi, wasiat wakaf dalam surat wasiat. Pengelolaan wakaf surat

berharga yang berbentuk saham dan obligasi terbuka ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden (bagi hasil), serta pengembangan portofolio untuk menghindari terjadinya aset yang default. Deviden yang surplus yang akan didaya gunakan untuk program-program sosial sesuai peruntukannya (pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan).⁷¹

4) Waris

Harta waris merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.⁷² Besarnya jumlah harta waris yang diberikan kepada setiap keluarga berbeda-beda tergantung seberapa besar tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing individu dalam setiap keluarga.⁷³ Waris dalam Islam erat kaitannya dengan distribusi kekayaan dalam keluarga. Terutama keinginan agar tercipta keadilan dalam pembagian harta waris. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi Islam bahwa harta harus tersebar dimasyarakat dan bukan terkumpul pada satu atau dua orang saja. Konsep waris Islam merupakan mekanisme distribusi kekayaan dan jaminan sosial riil dalam keluarga.⁷⁴ Distribusi kekayaan yang secara adil melalui waris ini menjadi motivasi kepada pewaris untuk tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan miskin.

⁷¹ Nurul Huda, *Op. Cit*, h. 151.

⁷² Irfan Syauqi, *Op. Cit*, h. 110.

⁷³ Ruslan Abdul ghofur, *Op. Cit*, h 117.

⁷⁴ *Ibid*,

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah dilakukan. Adapaun kajian yang d analisis anatar lain yaitu:

Tabel 2.5

Daftar Penenltian Terdahulu

No	Judul	Metode dan Variabel	Kesimpulan
1	Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1990 2004 By: Wongdesmiwati (2009)	Metode analisi berganda X_1 = jumlah penduduk Indonesia per tahun X_2 = pertumbuhan ekonomi X_3 = angka harapan hidup X_4 = persentase angka melek huruf X_5 = persentase pengguna listrik X_5 = persentase konsumsi makanan	1. Varibael Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. 2. Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. 3. Variabel angka harapan hidup, penggunaan listrik, dan konsumsi makanan tidak signifikan berpengaruh terhadap penduduk miskin
2	Dampak pertumbuhan	Metode estimasi	1. Variabel pertumbuhan ekonomi

	<p>ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin studi 26 provinsi di Indonesia tahun 1995-2005</p> <p>By: hermanto siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008)</p>	<p>ekonometrika data panel dimana:</p> <p>POV adalah jumlah penduduk miskin, PDRB adalah pertumbuhan ekonomi,</p> <p>POP adalah jumlah penduduk,</p> <p>AGRISHR adalah pangsa sektor pertanian,</p> <p>INDTRSHR adalah pangsa sektor industri,</p> <p>INFLASI adalah tingkat inflasi tahunan, SMP adalah jumlah lulusan sekolah SMP,</p> <p>SMA adalah jumlah lulusan SMA, DIPLM adalah jumlah lulusan sekolah setingkat diploma, dan</p> <p>DUMMYKRISI adalah dummy krisis ekonomi</p>	<p>berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin walaupun dengan pengaruh yang relative kecil.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Variabel inflasi dan variabel populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan 3. variabel pangsa sektor pertanian dan pangsa sektor industri secara signifikan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. 4. Variabel yang berpengaruh negatif paling besar dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin adalah pendidikan
--	--	---	--

3	<p>Analisis dampak kebijakan upah minimum terhadap kemiskinan di Indonesia</p> <p>By: Danny Nur Febrianica, Devanto Shasta Pratomo</p>	<p>Metode Analisis berganda dimana:</p> <p>X_1 = upah minimum</p> <p>X_2 = umur</p> <p>X_3 = lokasi tempat tinggal</p> <p>X_4 = tingkat pendidikan terakhir</p> <p>X_5 = sektor pekerjaan</p> <p>Y = kemiskinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel lokasi tempat tinggal, sektor pekerjaan pertanian, sektor pekerja perdagangan, dan sektor pekerjaan jasa berpengaruh positif terhadap kemiskinan 2. Variabel upah minimum, umur pekerja, tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan
4	<p>Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Barat</p>	<p>Metode Regresi sederhana dimana:</p> <p>X_1 = pengangguran</p> <p>X_2 = kemiskinan</p>	<p>Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.</p>
5	<p>Analisis pengaruh PDRB, pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008</p>	<p>Metode Regresi berganda dimana:</p> <p>X_1 = PDRB</p> <p>X_2 = Pendidikan</p> <p>X_3 = Pengangguran</p> <p>Y = Kemiskinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan 2. Variabel pendidikan yang diproduksi dengan angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan

	By: Ravi Wijayanto		3. Variabel pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa tengah
--	--------------------	--	--

Dengan melihat tabel diatas, maka dapat dilihat perbedaan dan persamaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan yaitu sama-sama tentang pengaruh pertumbuhan, upah minimum pengangguran, terhadap tingkat kemiskinan.

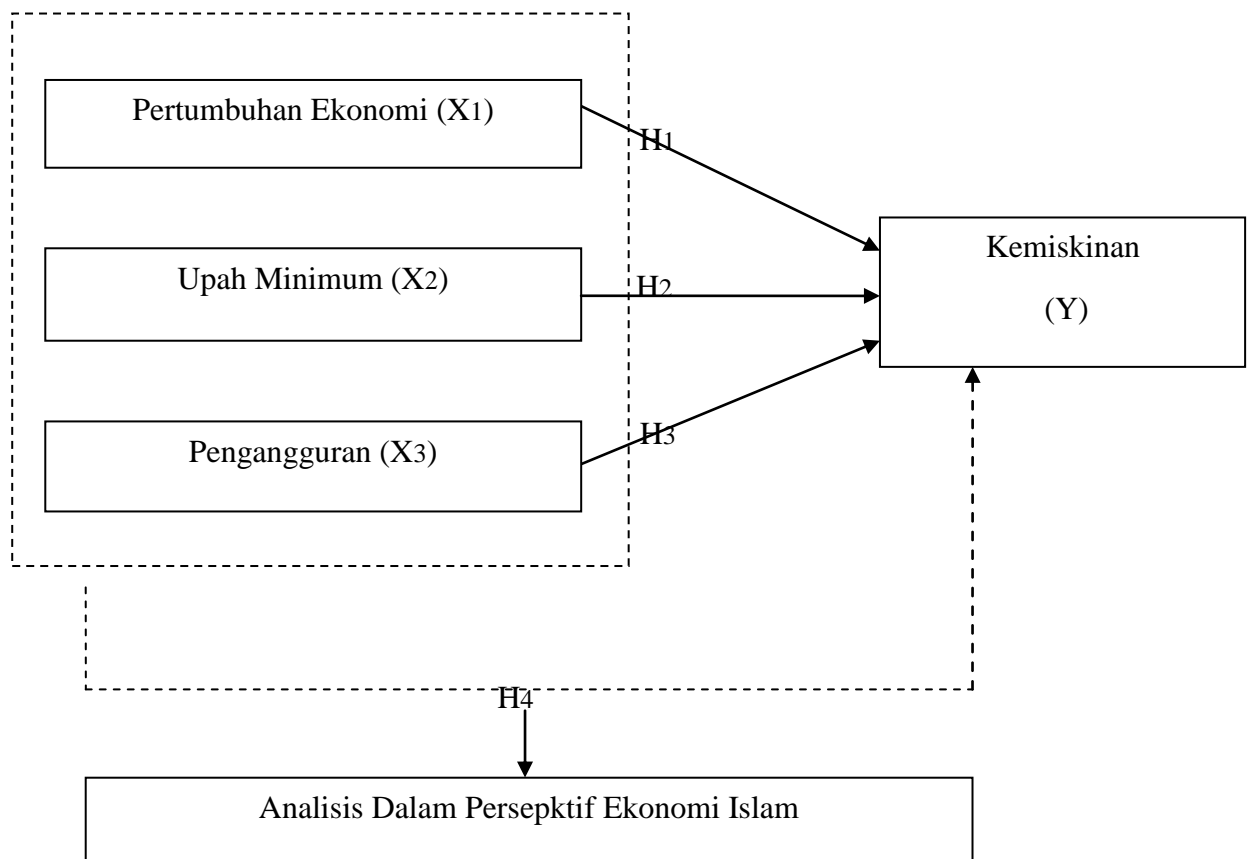
Sedangkan yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah metode dan variabel yang digunakan dalam melakukan penelitian serta objek penelitiannya, untuk penelitian pertama objek penelitiannya adalah di Indonesia tahun 1990-2004, metode yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis berganda dengan lima variabel (jumlah penduduk Indonesia, pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, persentase angka melek huruf, persentase pengguna listrik, persentase konsumsi makanan. Penelitian yang kedua objek penelitiannya berada di 26 provinsi yang ada di Indonesia, metode yang digunakan menggunakan metode estimasi ekonometrika data panel untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin, dengan menggunakan tujuh variabel (jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, pangsa sektor pertanian, pangsa sektor industri, tingkat inflasi tahunan, jumlah lulusan sekolah. Untuk penelitian yang ke tiga objek penelitiannya adalah pada negara Indonesia, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan

analisis berganda dimana menggunakan 6 variabel (upah minimum, umur, lokasi tempat tinggal, tingkat pendidikan terakhir, sektor pekerjaan, dan kemiskinan). Untuk penelitian yang ke empat objek penelitiannya pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan barat, metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi sederhana dengan variabel (upah minimum, dan kemiskinan). Dan untuk penelitian yang ke lima objek penelitiannya pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2005-2008, metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda menggunakan empat variabel yaitu (PDRB, pendidikan, pengangguran dan kemiskinan). Sedangkan untuk penelitian yang sekarang objek penelitiannya adalah pada Provinsi Lampung tahun 2011-2015, serta metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda dan menggunakan 4 variabel yaitu dengan variabel bebas pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan variabel terikat Tingkat Kemiskinan

A. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan Kegiatan Penelitian Yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran.

Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran



Dari kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang lazim digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Tambahan pendapatan dari aktivitas ekonomi akan berpengaruh terhadap kemiskinan jika mampu menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan miskin. Semakin banyak golongan miskin memperoleh manfaat dari pertumbuhan

ekonomi maka kesejahteraannya akan meningkat dan lepas dari kemiskinan.

Tujuan utama penetapan upah minimum adalah meningkatkan kesejahteraan dan melindungi pekerja. Upah minimum mencerminkan pendapatan yang diterima pekerja, adanya kenaikan tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penetapan upah minimum yang pantas dan tepat diharapkan mendorong penduduk yang berada dibawah kemiskinan mampu hidup layak sehingga tingkat kemiskinan akan turun.

Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Kondisi menganggur menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan, akibatnya kesejahteraan yang telah dicapai akan semakin merosot. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan

10. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pertanyaan.⁷⁵ Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan.

Tingginya tingkat kemiskinan suatu daerah menggambarkan kurangnya pemerintahan tersebut dalam menggali potensi daerahnya. Semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu daerah maka tingkat ketergantungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin bertambah. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan, maka diperlukan analisis perkembangan indikator makro ekonomi diantaranya Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran. Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang sudah dijelaskan, maka dapat dilihat hubungan antara variabel independen terhadap dependen sebagai berikut :

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Siregar menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keberhasilan (*necessay condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient conditoin*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar setiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*).⁷⁶

⁷⁵ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan Kombinasi* (Bandung : Alfabeta, 2014), h 99

⁷⁶ Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, *Log. Cit*, h. 27.

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati, menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan.⁷⁷ Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti.

Sehingga dari penjelasan teori dan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemsikinan maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Ho : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2010-2014.
- 2) H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2010-2014.

b. Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan

Menurut Kaufirman Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum

⁷⁷ Wongdesmiwati, *Log. Cit*, h. 25.

akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan.⁷⁸

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi 55 pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.⁷⁹

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Danny Nur Febrianica yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dengan kemiskinan di Indonesia.⁸⁰

Sehingga dari penjelasan teori dan pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Ho : Upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2010-2014.
- 2) H2 : Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2010-2014.

⁷⁸ Adit Agus Prastyo, *Analisis Faktor-Fktor Ynag Mempnegaruhi Tingkat Kemsikinan* (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007, Universitas Diponegoro, h. 54.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 55.

⁸⁰ Danny Nur Febrianica, *Article, Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Indonesia*, (Malang, Universitas Brawijaya, 2005), h.19.

c. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.⁸¹

Penelitian yang dilakukan oleh Yarlina Yacoub yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data empiris menunjukkan pola hubungan yang tidak selalu searah antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.⁸²

Sehingga dari penjelasan teori dan pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁸¹ Adit Agus Prastyo, Op. Cit, h. 64.

⁸² Yarlina Yacoub, *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012, h. 176-185.

- 1) H_0 : Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2011-2014.
- 2) H_3 : Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2011-2014.

Sehingga dari penjelasan teori dan pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum , dan Pengangguran terhadap Kemiskinan maka dapat disimpulkan hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) H_0 : Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum , dan Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.
- 2) H_4 : Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum , dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹

Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan indikator makro ekonomi yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, Pengangguran dan juga tentang Tingkat Kemiskinan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung serta data dari jurnal dan artikel.²

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati Dan Kualitati Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.11.

²Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.5.

Yang berkaitan dengan data , Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pengangguran dan juga tentang Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif asosiatif karena adanya variabel-variabel yang akan di telaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti.³ yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.⁴ Karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran Terhadap tingkat Kemiskinan dan berapa persen mempengaruhinya.

B. Sumber Data

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data Kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/*scoring*.⁵ Data-data kuantitatif dalam penelitian ini menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi

³ Zulfikar, Pengantar Pasar Modalmdengan Pendekatan Statistik, (Depublish: 2016), h. 215.

⁴ Moh. PrabunduTika, *MetodelogiRisetBisnis*, (Jakarta : BumiAksara, 2006), h.10.

⁵ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 6.

Lampung baik secara simultan maupun parsial ditinjau dalam persepektif Ekonomi Islam.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya tetapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu.⁶ Data sekunder berasal dari sumber internal maupun eksternal. Dalam hal ini, data sekunder yang bersifat internal didapat melalui data-data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yaitu data Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pengangguran dan juga tentang Tingkat Kemiskinan yang tersusun dari tahun 2012-2017 berupa data runtut waktu (*time series*) dan yang bersifat eksternal didapat melalui sumber-sumber di luar instansi yang dipublikasikan dan juga jurnal, artikel, Al-Qur'an, Al- Hadis dan internet. Dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data, Untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan

⁶*Ibid*, h.138.

mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti total Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran dan juga tentang Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2012-2017 periode Maret-September yang diperoleh dari BPS Provinsi Lampung, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan BPS kota Bandar Lampung.

2. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian, dalam pencarian teori peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan yang peneliti buat bersumber dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi) dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dan lain-lain).

D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁷. Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu data Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Pengangguran pertahun yang telah di publikasikan oleh BPS

⁷*Ibid*, h. 119.

Kota Bandar Lampung, yang diambil yaitu 6 tahun terakhir dari tahun 2012-2017 Periode Maret-September.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu⁸. Dalam penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu data total Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran Tingkat Kemiskinan pada tahun 2012-2017 yang telah tersusun dalam bentuk laporan atau presentase yang diterbitkan oleh Provinsi Lampung .

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian⁹. Dalam hal ini penulis menggunakan sampel delapan tahun terakhir yaitu tahun 2012-2017.

E. Definisi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel devenden dan variabel indevenden.

1. Variabel Terikat (variabel Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu Tingkat Kemiskinan. data Tingkat

⁸*Ibid*, h.126.

⁹*Ibid*, h. 120.

Kemiskinan yang akan diteliti adalah data dari BPS Provinsi Lampung yang diambil dari tahun 2012-2017.

2. Variabel Bebas (Variabel independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel devenden (terikat). Variabel indeviden dalam penelitian ini adalah data Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran yang diperoleh dari BPS Provinsi Lampung.

Skala Pengukuran Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Rasio. Dimana Skala Rasio merupakan skala interval dan memiliki nilai dasar (*based value*) yang tidak dapat dirubah. Data yang dihasilkan dari skala rasio disebut data rasio dan tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistik yang sesuai. Variabel yang diukur dengan skala rasio disebut variabel metrik. Sehingga skala pengukuran variabel yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah rasio Rupiah (Rp) dan persentase (%).

Tabel 2.7

Daftar Variabel Penelitian

Variabel	Ukuran	Sumber/ Referensi	Skala Pengukuran Variabel
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	$PDB_1 = PDB_0 (1+R)^1$	BPS /Tahun	Rasio (%)

Upah Minimum (X2)	$U_{mn} = U_{mt} + \{U_{mt} \times (\text{inflasi } t + \% \Delta \text{ PDB } t)\}$	BPS/Tahun	Rasio (Rp)
Pengangguran (X3)	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	BPS/Tahun	Rasio (%)
Kemiskinan (Y)	$GK = GKM + GKNM$	BPS/Tahun	Rasio (%)

F. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit ditarik generalisasi yang mempunyai sifat khusus¹⁰.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel. Penggunaan analisis deskriptif ini ditujukan untuk mengetahui

¹⁰SutrisnoHadi, *Metode Reseach*(Yogyakarta: ANDI,2002),h. 42.

Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan.

G. Uji Asumsi Klasik

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah di dalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Apabila data regresi sudah melewati empat masalah dalam uji asumsi klasik maka data dapat dikatakan lulus uji asumsi.

Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kolmogorovsmirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji *kolmogorovsmirnov* adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.

- 1) Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal.

2) Jika $\text{Sig} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.¹¹

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dimaksudkan apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (*independent*). Apabila terjadi kolerasi antara variabel bebas, maka terdapat problem multikolineritas (multiko) pada model regresi tersebut. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolineritas adalah koefisien korelasi antar variabel *independent* haruslah lemah dibawah 0,05 Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolineritas¹².

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. Autokolerasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi dalam suatu penelitian.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

¹¹ V. WiratnaSujarweni, *SPSS Untuk Penelitian* , (Yogyakarta : PustakaBaruPers, 2015), h. 52-56.

¹² SutrisnoHadi , *Op.Cit*, h.207.

H. Uji Hipotesis

1. Regresi Linear Berganda

Untuk alat uji Hipotesis peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).¹³

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat, yaitu variabel Tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung

X1 = Variabel Pertumbuhan Ekonomi

X2 = Variabel Upah Minimum

X3 = Variabel Pengangguran

b_{1,2,3} = Koefisien Regresi

a = Konstanta

e = Error

2. Koefisien Determinasi

¹³Usman, HusainidanSetiadi, *PengantarStatistika*,(Jakarta: PT Bumi Aksara,2003),h.241.

Pada model linier berganda ini akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2). Jika determinasi totalnya (R^2) yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika determinasi totalnya (R^2) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.¹⁴

3. Uji F atau Uji Simultan

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program Eviews, dalam uji f menguji bagaimana pengaruh semua faktor-faktor tersebut mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam uji ini yang dilihat adalah nilai Prob. (Sig) yang harus dibawah 10%. Jika nilai Prob. (Sig) dibawah 5% atau 0,05 berarti faktor-faktor tersebut secara bersama-sama mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga.

4. Uji t atau Uji Parsial

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1 , X_2 ,

¹⁴Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung : PT. Tarsito, 2009), h.373.

X3) pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran mempengaruhi variabel dependen (Y) kemiskinan..

Langkah-langkah pengujiannya:

Menentukan formulasi H_0 dan H_a , Hipotesis:

H_0 = Tidak ada pengaruh antara pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan tabungan terhadap konsumsi rumah tangga.

H_a = Ada pengaruh antara pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan tabungan terhadap konsumsi rumah tangga

Kesimpulan:

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN AANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung berdiri pada tanggal 18 Maret 1964 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang No 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan karisidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Lampung adalah Provinsi yang paling strategis karena Provinsi Lampung menjadi pintu gerbang masuk ke Pulau Sumatera untuk dapat menuju ke provinsi-provinsi lainnya.

Visi Provinsi Lampung adalah : “Lampung Maju dan Sejahtera 2019”

Sedangkan Misi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah
2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama.

4. Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Menegakkan Supremasi Hukum, Membangun Peradaban Demokrasi dan Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme ASN.

Secara geografis, Provinsi Lampung terletak pada $103^{\circ}40'$ sampai $105^{\circ}50'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}45'$ sampai $3^{\circ}45'$ Lintang Selatan, disebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, sebelah Selatan dengan Selat Sunda, sebelah Timur dengan Laut Jawa dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Daerah Lampung memiliki luas dataran $35.288,35 \text{ Km}^2$ termasuk pulau- pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera, dan dibatasi oleh :

1. Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara
2. Selat sunda di sebelah selatan
3. Laut Jawa di sebelah Timur
4. Samudera Indonesia di sebelah Barat

Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung karang dan Telukbetung. Provinsi Lampung memiliki populasi penduduk ditahun 2010 sebanyak 7.608.405

jiwa. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda.

Secara Topografi, daerah Lampung memiliki lima unit topografis yaitu:

1. Daerah topografis berbukit sampai bergunung
2. Daerah topografis berombak sampai bergelombang
3. Daerah dataran *alluvial*
4. Daerah dataran rawa pasang surut, dan
5. Daerah *river* basin

Secara administrasi Provinsi Lampung memiliki lima belas Kabupaten/Kota, yang kemudian terbagi kepada beberapa kecamatan yaitu:

1. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukotanya Liwa, luas wilayahnya 2.142,78 Km² terdiri dari lima belas kecamatan.
2. Kabupaten Tanggamus, Kota Agung sebagai ibukotanya dengan luas wilayah 3.020,64 Km² yang terdiri dari dua puluh kecamatan.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda dengan luas wilayah 700,32 Km² terdiri dari tujuh belas kecamatan.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukada dengan luas wilayah 5.325,03 Km² terdiri dari dua puluh empat kecamatan.

5. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukotanya Gunung Sugih, luas wilayahnya 3.802,68 Km² terdiri dari dua puluh delapan kecamatan.
6. Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi dengan luas wilayahnya 2.725,87 Km² terdiri dari dua puluh tiga kecamatan.
7. Kabupaten Waykanan dengan ibukota Blambangan Umpu, dengan luas wilayah 3.921,63 Km² terdiri dari empat belas kecamatan
8. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala, dengan luas wilayah 3.466,32 Km² terdiri dari lima belas kecamatan.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan, dengan luas wilayah 2.243,51 Km² terdiri dari sebelas kecamatan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu, dengan luas wilayah 625,00 Km² terdiri dari sembilan kecamatan.
11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji, dengan luas wilayah 3.921,63 Km² terdiri dari tujuh kecamatan.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan Jaya, dengan luas wilayah 1.201,00 Km² terdiri dari delapan kecamatan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui, dengan luas wilayah 2.907,23 Km² terdiri dari sebelas kecamatan.
14. Kota Bandar Lampung, dengan luas wilayah 296 Km² terdiri dari dua puluh kecamatan.
15. Kota Metro, dengan luas wilayah 61,79 Km² terdiri dari lima kecamatan.

Secara *Geologi* punggung sebelah barat Lampung adalah bagian dari Bukit Barisan yang merupakan *Geantiklinal* dengan *Sinklinal* yang terdapat disebelah timurnya. Lapisan sedimen di sebelah timur ini umumnya tertutup juga oleh endapan tuffa massam sebagian hasil dari debu gunung api di Bukit Barisan yang membentuk dataran Peneplain di bagian timur Lampung.

Dari literatur dan peta Geologi daerah Lampung dapat diinventarisir adanya bahan-bahan tambang yaitu diantaranya Minyak Bumi, Uranium, batubara Muda, Mineral Besi, Emas dan Perak, Marmer, Sumber air panas dan Gas Bumi.

Secara umum, adat masyarakat Lampung dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat adat Saibatin yang berkediaman di sepanjang pesisir termasuk adat Krui, Ranau Komering, sampai Kayu Agung, dan adat Pepadun yang berkediaman di daerah pedalaman Lampung terdiri dari masyarakat Abung (Abung Siwo Migo), Pubian (Pubian Telu Suku), Menggala / Tulang Bawang (Migo Pak) dan BuaiLima (Marga Bunga Mayang Sungkai).

2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang sering terjadi sejak beberapa abad silam. Provinsi Lampung memiliki

angka kemiskinan yang sangat mengkhawatirkan angka masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya relatif tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab kemiskinan, diantaranya yaitu kualitas sumber daya manusianya, tingkat pengangguran, dan tingkat pendapatan per kapita. Sedikitnya masyarakat yang mengenyam pendidikan, banyaknya masyarakat yang buta huruf dan tidak memiliki keterampilan menyebabkan mereka tidak dapat berkarya, tidak produktif dan selalu mengandalkan orang lain sehingga mereka tidak memiliki pendapatan sendiri untuk meningkatkan perekonomian keluarganya masing-masing. Masyarakat yang tidak memiliki keterampilan tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri sehingga mereka hanya mengandalkan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah dan swasta sedangkan jumlah penduduk yang mencari pekerjaan semakin tinggi pula.

Saat ini, kemiskinan tidak hanya diartikan sebatas karena kekurangan ekonomi akan tetapi juga keterbatasan mendapatkan perlakuan dari lingkungan masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kelompok dimana mereka hanya mau bergaul dengan kelompok masyarakat yang sederajat. Sehingga banyak kelompok masyarakat kecil yang merasa terasingkan. Kesenjangan antara si kaya dan miskin sangat jelas terlihat oleh status sosial. Apalagi masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terperangkap dipinggiran kota dalam keadaan yang sangat

memperhatikan. Oleh karena itu, disini pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, pemerintah tentunya dengan dukungan masyarakat harus berupaya untuk melakukan kebijakan yang dapat menuntaskan atau mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di provinsi Lampung.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung tertinggi terjadi pada tahun 2012 periode maret yakni sebanyak 16,18 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah terjadi pada periode September tahun 2017 sebesar 13,43 persen, hal tersebut menunjukkan meskipun terjadi pergerakan yang fluktuatif pada setiap tahunnya tetapi secara umum kemiskinan di Provinsi lampung mulai menurun.

Berikut ini disajikan data tentang kemiskinan yang terjadi di provinsi Lampung dalam satuan persen selama kurun waktu 2012 – 2017 periode Maret-September.

Tabel 1
Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung
Tahun 2012-2017 (Periode Maret-September)

Tahun	Periode	Presentase
2012	Maret	16,18
	September	15,65
2013	Maret	14,86
	September	14,39
2014	Maret	14,28
	September	14,21
2015	Maret	14,35
	September	13,53
2016	Maret	14,29
	September	13,86
2017	Maret	13,69
	September	13,43

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Tahun 2017

3. Upah Minimum

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Sebagai imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan kepada pekerja dalam bentuk upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha.

Berikut disajikan data Upah minimum Provinsi Lampung dari tahun 2012-2017,

Tabel 2
Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung
Tahun 2012-2017 (Periode Maret-September)

Tahun	Periode	Jumlah
2012	Maret	975.000
	September	975.000
2013	Maret	1.150.000
	September	1.150.000
2014	Maret	1.399.037
	September	1.399.037
2015	Maret	1.581.000
	September	1.581.000
2016	Maret	1.763.000
	September	1.763.000
2017	Maret	1.908.447
	September	1.908.447

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, Tahun 2017

4. Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.¹⁶⁰ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut BPS adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator yang sangat erat hubungannya dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung yang terbesar adalah 5,69 persen terjadi pada tahun 2013 periode September sedangkan tingkat pengangguran terendah sebesar 3,44 persen terjadi pada Maret 2015. Hal ini bisa

terjadi karena banyak masyarakat yang beranggapan untuk memperbaiki nasib di kota, sehingga banyak masyarakat melakukan transmigrasi dari desa ke kota, sesampainya di kota ia tidak memiliki kemampuan yang cukup sehingga banyak yang menjadi pengangguran yang berada di kota Bandar Lampung.

Berikut disajikan data persentase tingkat pengangguran terbuka menurut kota/kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2012-2017 dalam satuan persen adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung
Tahun 2012-2017 (Periode Maret-September)

Tahun	Periode	Presentase
2012	Maret	5,21
	September	5,20
2013	Maret	5,07
	September	5,69
2014	Maret	5,08
	September	4,79
2015	Maret	3,44
	September	5,14
2016	Maret	4,54
	September	4,62
2017	Maret	4,43
	September	4,33

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Tahun 2017

5. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. Aktivitas ekonomi yang dimaksud dalam PDRB ini meliputi kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan jasa. PDRB merupakan suatu indikator yang sangat penting dalam menentukan potensi dan peran ekonomi dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan harga konstan, akan tetapi untuk pengukuran pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan karena nilainya akan lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh tekanan inflasi dan kondisi ekonomi yang tengah terjadi. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi di Provinsi Lampung yaitu sebesar 6,59 persen pada tahun 2012 sedangkan laju pertumbuhan terendah yaitu sebesar 4,79 persen pada tahun 2014. Berikut disajikan data laju pertumbuhan PDRB di provinsi Lampung tahun 2012 – 2017.

Tabel 4
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung
Tahun 2012-2017 (Periode Maret-September)

Tahun	Periode	Presentase
2012	Maret	6,44
	September	6,59
2013	Maret	5,77
	September	5,69
2014	Maret	5,08
	September	4,79
2015	Maret	5,13
	September	5,14
2016	Maret	5,15

	September	5,56
2017	Maret	5,45
	September	5,60

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Tahun 2017

B. Analisis Data

1. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidaknya. Untuk itu data yang telah ada sebelumnya harus diuji agar memenuhi persyaratan normalitas, alat uji yang digunakan adalah uji *one sample kolmogrov-smirnov*. Data dinyatakan terdistribusi secara normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan *kolmogrof-smirnov* terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.39109669
Most Extreme Differences	Absolute	.267
	Positive	.267
	Negative	-.180
Kolmogorov-Smirnov Z		.926
Asymp. Sig. (2-tailed)		.357

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas dengan menggunakan metode *one sampel komogrov-smirnov* menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel dependen dan variabel independen pada jumlah sampel (N) sebesar 5 adalah 0,35. Dengan demikian, data dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena semua nilai residual varibelnya lebih besar dari signifikansi 0,05 , sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

2. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dilakukan untuk melihat terdapat gangguan atau tidak terhadap data di mana multikolineritas terjadi apabila ada kolerasi antar variabel independen. Dengan demikian uji ini dilakukan agar data

yang ada harus terbebas dari gangguan multikolinieritas. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan ketentuan harus berada dibawah 10, hal ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	16.734	2.445		6.845	.000		
Upah_Minimum	-2.407E-6	.000	-.914	-4.272	.003	.516	1.939
Pengangguran	-.511	.280	-.379	-1.826	.105	.547	1.828
PDRB	.582	.308	.333	1.887	.096	.758	1.319

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Berdasarkan uji multikolinieritas diatas dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antara masing-masing variabel independen dalam model regresi yaitu dengan melihat VIF dan nilai *tolerance*. Hasil perhitungan *tolerance* yaitu Upah Minimum (0,516), Pengangguran (0,547) dan PDRB (0,758) menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu

variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Nilai VIF adalah sebesar Upah Minimum (1,939), Pengangguran (1,828), PDRB (1,319) lebih kecil dari 10, yang artinya tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian maka digunakan uji Durbin Watson (DW).

Tabel 7
Hasil Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.901 ^a	.811	.741	.45860	2.044

a. Predictors: (Constant), PDRB, Pengangguran, Upah_Minimum

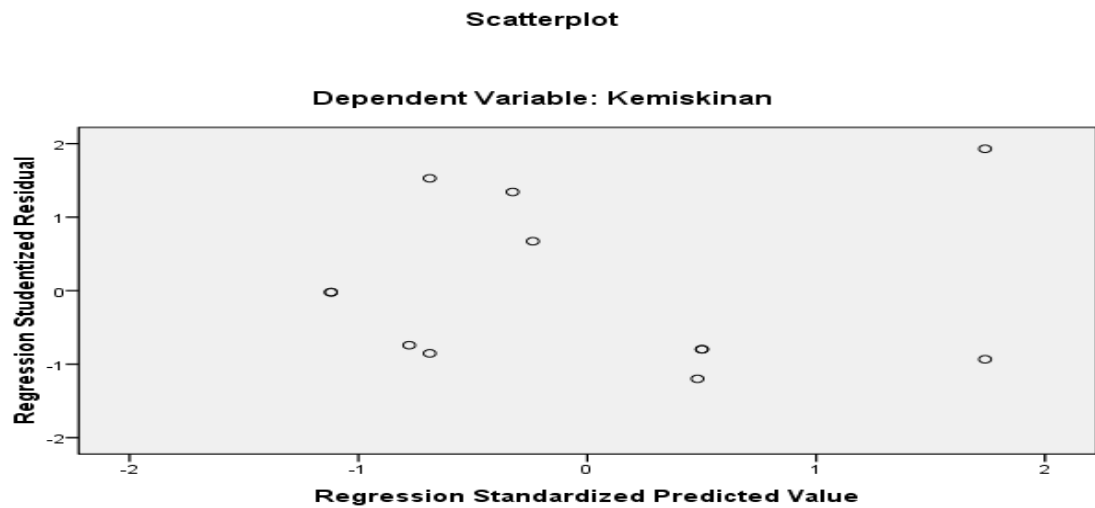
b. Dependent Variable: Kemiskinan

Dilihat dari tabel diatas diketahui nilai Durbin Watson (d) 2,044 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai 5%. Jumlah sampel (N) 12 dan jumlah variabel independen (K) adalah 3 diperoleh nilai d_l sebesar 0,657 dan nilai d_u sebesar 1,864 dengan ini maka didapat $4 - d_u$ ($4 - 1,864$) = 2,136 . Sehingga diperoleh kesimpulan

nilai $du < dw < 4 - du = 0,657 < 2,044 < 2,136$ dengan demikian tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik – titik data menyebar di atas dan di bawah atau angka 0, titik-titik data yang tidak mengumpul hanya diatas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, hasil penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: ini.



Gambar 1
Hasil Heterokedastisitas

Hasil pengolahan data heteroskedastisitas diperoleh titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak berpola jadi tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.734	2.445		6.845	.000
Upah_Minimum	-2.407E-6	.000	-.914	-4.272	.003
Pengangguran	-.511	.280	-.379	-1.826	.105
PDRB	.582	.308	.333	1.887	.096

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh upah minimum, pengangguran dan PDRB terhadap kemiskinan periode 2012-2017. Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 16,734 - 2,407 X_1 - 0,511 X_2 + 0,582 + e$$

Dimana: $a = \text{konstanta} = 16,734$

$X_1 = \text{Upah Minimum} = -2,407$

$X_2 = \text{Pengangguran} = -0,511$

$X_3 = \text{PDRB} = 0,582$

Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 16,734 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya bernilai nol, maka variabel kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 16,734 satuan.
- b. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan koefisien regresi negatif dengan upah minimum $b_1 = -2,407$ bertanda negatif artinya menunjukkan apabila setiap penurunan 1% upah minimum maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 2,407. Hal tersebut menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara upah minimum dengan kemiskinan
- c. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan koefisien regresi negatif dengan pengangguran $b_2 = -0,511$ bertanda negatif artinya menunjukkan apabila setiap penurunan 1% pengangguran, maka

kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,511. Jika semakin menurun pengangguran di Provinsi Lampung maka semakin mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung. Sebaliknya, jika semakin meningkat pengangguran yang ada di Provinsi Lampung maka semakin membuat kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami peningkatan.

- d. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan koefisien regresi positif dengan PDRB $b_3 = 0,582$ bertanda positif artinya menunjukkan apabila setiap kenaikan 1% PDRB maka kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0,582. Hal tersebut menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara PDRB dengan kemiskinan

3. Uji Hipotesis

- a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari upah minimum, pengangguran, dan PDRB terhadap penyerapan kemiskinan di Provinsi Lampung secara bersama-sama. Untuk mengetahui secara signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probabilitas sebesar 5% (0,05)

Tabel 9
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.234	3	2.411	11.466	.003 ^a
	Residual	1.683	8	.210		
	Total	8.917	11			

a. Predictors: (Constant), PDRB, Pengangguran, Upah_Minimum

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Diketahui nilai signifikansi Uji F $0,003 < 0,05$ maka hipotesis H0 ditolak dan Hipotesis Ha diterima, artinya ada pengaruh secara simultan (bersama-sama) upah minimum, pengangguran dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung

b. Uji T

Uji t dilakukan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas yakni upah minimum, pengangguran dan PDRB secara individual atau parsial terhadap variabel terikat yakni penyerapan tenaga kerja.

Tabel 10
Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.734	2.445		6.845	.000
	Upah_Minimum	-2.407E-6	.000	-.914	-4.272	.003
	Pengangguran	-.511	.280	-.379	-1.826	.105
	PDRB	.582	.308	.333	1.887	.096

a. Dependent Variable: Kemiskinan

- 1) Pengujian pengaruh upah minimum terhadap upah kemiskinan; diketahui nilai sig. $0,003 < 0,05$ maka hipotesis H_0 ditolak, dan H_a diterima. Artinya secara parsial atau individual variabel Upah Minimum (X_1) berpengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y).
- 2) Pengujian pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan; diketahui nilai sig. $0,105 > 0,05$ maka hipotesis H_0 diterima, dan H_a ditolak. Artinya secara parsial atau individual variabel Pengangguran (X_2) tidak berpengaruh terhadap variabel Kemiskinan (Y).
- 3) Pengujian pengaruh PDRB terhadap kemiskinan; diketahui nilai sig.

0,096 > 0,05 maka hipotesis H_0 diterima, dan H_a ditolak. Artinya secara parsial atau individual variabel PDRB (X_3) tidak berpengaruh terhadap variabel Kemiskinan (Y).

C. Pembahasan

1. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Kenaikan upah minimum dari tahun ke tahun diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dimulai dari kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Tenaga kerja yang berpendidikan, berwawasan, memiliki keterampilan yang bagus, sehat secara jasmani dan rohani akan lebih kuat dan mampu berinovasi dan berdaya saing dalam dunia kerja dan itu semua dapat diperoleh dengan mencukupi segala kebutuhan yang mereka butuhkan sehingga produktivitas meningkat dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan adalah berpengaruh negatif tidak signifikan, dibuktikan dengan hasil statistik bertanda negatif tidak signifikan.

Dari hasil Regresi Linier Berganda diperoleh nilai koefisien 2,407 dan bertanda negatif (-2,407), yang menyatakan bahwa bentuk

hubungan antara Upah Minimum terhadap kemiskinan adalah berbanding terbalik yang berarti bahwa peningkatan faktor Upah Minimum seharusnya menurunkan kemiskinan. Akan tetapi dalam penelitian ini, hasil pengujiannya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, artinya Upah Minimum tidak terlalu mempengaruhi tingkat kemiskinan.

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Dampak dari pengangguran terasa sangat berarti bagi masyarakat. Apalagi para penganggur tersebut memiliki keluarga dan tanggungan yang harus dipenuhi. Pengangguran semakin memperkeruh kondisi perekonomian apabila berlangsung dalam waktu yang lama. Didalam beberapa kondisi kemiskinan yang diakibatkan oleh pengangguran menimbulkan banyak masalah seperti perilaku kejahatan dan sebagainya. Pengangguran seringkali terjadi akibat tidak mencukupinya lapangan pekerjaan yang tersedia. Ditambah lagi motivasi dan usaha untuk membuka lapangan kerja sendiri melalui kegiatan wirausaha masyarakat masih minim. Selain itu faktor yang menimbulkan angka pengangguran terus bertambah karena kondisi ekonomi makro di wilayah khususnya Lampung tidak

menentu sehingga para perusahaan tidak dapat mengembangkan usahanya di Lampung sehingga proses perekrutan tenaga kerja tidak maksimal.

Nilai koefisien 0,511 yang bertanda negatif (-0,511) menyatakan bahwa bentuk hubungan Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan adalah berbanding lurus yang berarti bahwa penurunan faktor Pengangguran akan menurunkan kemiskinan. Dalam penelitian ini secara teori dan hipotesis pengaruh Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan adalah berpengaruh positif secara signifikan, begitu juga secara statistik pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Produk Domestik Regional Bruto dilihat sebagai salah satu faktor terpenting untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi disuatu wilayah. PDRB sebagai nilai total pendapatan diberbagai sektor seperti pertanian, pertambangan, industri, listrik, perdagangan, pengangkutan, bank dan jasa memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Apabila pendapatan secara perkapita yang dihasilkan oleh provinsi Lampung meningkat secara otomatis akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi PDRB akan memiliki peran bagi masyarakat miskin apabila penyalurannya merata hingga kelini-lini masyarakat miskin.

Nilai koefisien 0,582, menyatakan bahwa bentuk korelasi PDRB terhadap tingkat kemiskinan adalah berbanding terbalik yang berarti bahwa peningkatan faktor PDRB seharusnya menurunkan kemiskinan. Akan tetapi dalam penelitian ini, hasil pengujiannya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, artinya PDRB tidak terlalu mempengaruhi tingkat kemiskinan.

4. Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut imam Al Ghazali kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukan merupakan kemiskinan. Dalam Islam tidak membenarkan sikap berlebihan atau berfoya-foya oleh karena itu Islam sangat mengutamakan kebutuhan yang sangat mendasar dan melarang manusia untuk hidup bermewahan dan berlebihan.

Kemiskinan tidak hanya berupa miskin secara material saja akan tetapi juga miskin secara spiritual. kemiskinan pada sejatinya tidak dapat dihilangkan karena menjadi *sunnatullah fil hayyah*,

berbagai jenis kebijakan dan program dengan sistem pemerintahan yang berbeda dari tahun ketahu, masalah kemiskinan tetap ada dan tidak dapat dihilangkan secara total, akan tetapi masih bisa ditekan dan diminimalisir persentase kemiskinan di seluruh wilayah dengan menggunakan beberapa program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh diri sendiri ataupun kebijakan dari pemerintah.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjadi orang berkecukupan. Karena Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah, oleh karena itu umat Islam sangat dianjurkan untuk memperoleh kehidupan yang layak dan berkecukupan. Akan tetapi tetap pada koridor sewajarnya dan tidak berlebihan.

Dengan angka pengangguran yang cukup tinggi di provinsi Lampung merupakan salah satu penyebab mengapa masyarakat hidup dibawah garis kecukupan atau berada pada posisi kemiskinan. Sehingga yang menjadi tugas utama pemerintah dan pihak yang terkait adalah bagaimana dapat melakukan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan prinsip pertumbuhan ekonomi dalam Islam yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan tujuan masyarakat akan mampu hidup secara mandiri dan mampu memberi kehidupan yang layak bagi

masayarakat yang lainya dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang secara otomatis dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara perkapita.

Kemiskinan dapat mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia karena dalam Islam, kemiskinan dapat mengancam kestabilan pemikiran dan membahayakan keluarga. Masyarakat miskin pada umumnya selalu bekerja sebatas untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa memikirkan pendidikan dan kehidupan sosial lainnya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk terus menuntut ilmu seluas-luasnya. Dalam keadaan miskin mereka tidak dapat menuntut ilmu di sekolah sehingga pemikirannya menjadi sempit, mudah tersinggung dan kurang bisa memahami keadaan dilingkungannya. Kemiskinan yang berlarut-larut akan menurunkan kemiskinan kepada generasi penerus sehingga tidak tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara.

Kemiskinan juga dapat mengancam masyarakat dan kestabilannya. Masyarakat miskin akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya bagi diri sendiri dan keluarganya. Oleh karena itu mereka akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan aturan yang dapat

merugikan masyarakat secara luas. Disini merupakan fungsi diperlukannya indeks pembangunan manusia yang tinggi sebagai refleksi terselenggaranya pendidikan yang baik yang secara otomatis dapat meningkatkan produktifitas dan menekan laju kemiskinan masyarakat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengentaskan kemiskinan dengan berbagai macam cara diantaranya, yang *pertama* dengan menghapuskan riba dan peningkatan sektor riil. Penghapusan riba akan secara efektif menekan laju inflasi karena kita tidak terpengaruh oleh pergerakan suku bunga dan kondisi ekonomi global secara langsung. Dengan begitu kemampuan daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Pada saat yang sama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berniaga, pemerintah harus mampu mendukung dan menggerakkan kepada masyarakat untuk berwirausaha sehingga mereka mampu mengangkat perekonomian keluarga secara mandiri. *Kedua*, pemerintah sebagai pelaku kebijakan fiskal harus mampu bersikap adil dengan memperhatikan setiap dampak daripada kebijakan yang diterapkan agar tidak semakin mengecilkan rakyat miskin anggaran negara harus mampu dikelola sebaik mungkin untuk mendorong perekonomian masyarakat miskin. *Ketiga*, infrastruktur seperti jalan umum, fasilitas umum, menjadi

kebutuhan penting untuk mempermudah akses dan jalur ekonomi masyarakat, semakin bagus akses jalan maka kegiatan ekonomi masyarakat juga akan semakin mudah dan cepat sehingga akan menghasilkan *feedback* yang lebih baik lagi. *Keempat*, pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi oleh karena itu pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap keduanya. Pendidikan dan kesehatan yang tercerminkan pada Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Lampung sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 cenderung mengalami kenaikan akan tetapi kenaikannya tidak terlalu signifikan menjadi PR khusus bagi pemerintah. *Kelima*, dengan pemerataan pendistribusian pendapatan, dalam hal proses pendistribusian kekayaan dalam Islam terdapat beberapa instrumen seperti zakat, infak, shodakoh, wakaf dan waris yang harus dikumpulkan, dimanajemen dan disalurkan sesuai porsi masing-masing secara adil dan merata. Zakat, merupakan harta kekayaan yang didapatkan dari para muzaki yaitu 2,5 persen dari harta kekayaannya setiap tahun memiliki peran yang sangat signifikan untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan menyalurkannya sebagai zakat produktif, artinya zakat yang disalurkan kepada kaum duafa tidak habis hanya untuk dimakan akan tetapi masih berkelanjutan, dikembangkan dan menghasilkan

keuntungan dikemudian hari. Wakaf juga memiliki peran yang sangat penting pada umumnya wakaf berupa tanah dan bangunan yang digunakan untuk kemaslahatan umat berupa fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian hasil dari wakaf dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang secara otomatis kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat tercermin dari meningkatnya angka indeks pembangunan manusia yang kemudian berdampak meningkatkan produk domestik regional bruto di setiap wilayah.

Dalam hal ini pemerintah mempunyai wewenang yang sangat besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan pendistribusian pendapatan secara menyeluruh dan adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan yang dilakukan dalam proses pembangunan ekonomi wilayah harus dapat menyentuh lini-lini masyarakat miskin.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian diatas, maka dihasilkan kesimpulan bahwa sebagai berikut :

1. Pengaruh tiga variabel bebas yaitu Upah Minimum, Pengangguran dan PDRB terhadap Kemiskinan di provinsi Lampung secara parsial atau individu dengan menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda menghasilkan bahwa Upah Minimum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung, sedangkan Pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung dan PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.
2. Pengaruh variabel Upah Minimum, Pengangguran dan PDRB terhadap kemiskinan di provinsi Lampung secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen ($F\text{-hitung} <$

F-tabel).

3. Dalam Islam kemiskinan tidak hanya berupa kemiskinan materiil akan tetapi juga kemiskinan spiritual. menurut perspektif syariah kemiskinan merupakan *sunnatullah fil hayah* yang tidak dapat dihilangkan sama sekali akan tetapi masih bisa diminimalisir dan ditingkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Meskipun demikian Islam sangat mengecam kemiskinan. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup berkecukupan karena kemiskinan dapat membahayakan akhlak, pemikiran, keluarga, dan yang lainnya. Kefakiran dapat mendekatkan kepada kekufuran sehingga Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk giat bekerja dan beribadah untuk meningkatkan taraf hidupnya masing-masing. Selain itu Islam menganjurkan kepada golongan orang kaya untuk mersedekahkan sebagian hartanya untuk membantu orang miskin. Selain itu peran pemerintah juga sangat diharapkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan perkapita, menciptakan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan di provinsi Lampung. Dalam Islam mengenal lima prinsip utama dalam mengentaskan kemiskinan yaitu Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*),

penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan masyarakat banyak (*pro-poor budgeting*), pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*), penyediaan publik dasar (*pro-poor public services*), kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak masyarakat miskin (*pro-poor income distribution*).

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran terhadap hasil penemuan ini yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pekerja maupun keluarganya melalui kenaikan upah minimum sehingga perekonomian masyarakat lebih meningkat dan pada akhirnya pengaruh terhadap kemiskinan menjadi signifikan.
2. Pemerintah harus mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta menerapkan kebijakan yang dapat mendorong masyarakat untuk mampu menjadi wirausaha mandiri agar mereka dapat mengentaskan kemiskinan keluarganya serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
3. Pemerintah harus mendistribusikan pendapatan daerah secara adil dan merata sehingga seluruh lapisan masyarakat termasuk

masyarakat miskin dapat menikmati hasil dari pembangunan ekonomi demi kesejahteraan bersama.

4. Masyarakat harus mau berusaha untuk mengentaskan kemiskinan dimulai dari diri sendiri dan keluarga dengan cara berwirausaha seperti yang dianjurkan oleh agama Islam dengan dibantu dan didorong oleh kebijakan- kebijakan pemerintah yang pro rakyat miskin.